



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA/RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI XI DPR RI**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 18 (delapan belas)
Jenis Rapat : Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sekjen BPK, BPKP,
LKPP dan Kepala BPS.
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 4 September 2019
Waktu : 19.00 WIB s.d. Selesai.
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI
Ketua Rapat : Ir. H. Soepriyatno/Wakil Ketua Komisi XI
Sekretaris Rapat : Drs. Urip Soedjarwono
Acara : Pengambilan Keputusan RKA K/L Tahun 2020
Hadir Pemerintah : 1. GELLWYNN YUSUF (SEKRETARIS UTAMA
BAPPENAS)
2. DADANG KURNIA, Ak.,MBA.,CA.,CGAP
(SEKRETARIS UTAMA BPKP)
3. DR. SUHARYANTO (KEPALA BPS)
4. BAHTIAR ARIF (SEKJEN BPK RI)
5. DR. IR. RONI DWI SUSANTO, M.Si. (KEPALA
LKPP)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Ir. H. SOEPRİYATNO/F-P. GERINDRA):

Assalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas yang diwakili oleh Plt. Sekretaris Kementeria PPN atau Sekretaris Utama Bappenas beserta jajarannya,
Yang terhormat Saudara Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan beserta jajarannya,
Yang terhormat Saudara Kepala Badan Pusat Statistik beserta jajarannya,
Yang terhormat Saudara Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diwakili oleh Sekretair Utama BPKP beserta jajarannya, diwakili Pak ya BPKP ya,
Yang terhormat Saudara Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) beserta jajarannya,
Yang terhormat Anggota Komisi XI DPR RI, dan
Hadirin yang berbahagia.

Menurut catatan yang kami terima dari sekretariat daftar hadir rapat telah ditandatangani oleh 28 Anggota terdiri dari 10 fraksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI ijinlah kami membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 19.00 WIB)

Para hadirin yang terhormat di meja Pimpinan ada surat dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas bahwa beliau sedang berada di luar negeri ya ada pekerjaan di luar negeri ada tugas di luar negeri dan diwakilkan kepada Plt. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Sekretaris Utama, benar Pak ya, ya Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk hadir mewakili pada Rapat Kerja tersebut.

Selain itu dari BPKP ada surat juga menunjuk undangan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI yang akan dilaksanakan padah hari Rabu, 4 September 2019 sesuai surat nomor AG dengan ini kami sampaikan bahwa kami mohon ijin tidak hadir karena sakit dan memberi amanah penuh kepada nama Dadang Kurnia NIP. 196109301982031001 Jabatan Sekretaris Utama BPKP untuk mewakili saya dan mengambil keputusan. Demikian kami sampaikan permohonan ini. Atas perhatian Pimpinan Komisi XI DPR RI kami ucapkan terima kasih, pelaksana tugas kepala Iswan Elmi. Jadi ini saya mohon pendapat dari teman-teman, jadi kalau karena ini waktu kita juga sangat mepet ya besok kita mestinya pagi acara Fit and Propertest BPKP jam sepuluh, karena jam sepuluh ada Paripurna sehingga ini akhirnya mundur keatas sehingga besok rapat dengan Kementerian Keuangan terpaksa kita akan

jadikan hari Jumat, Jumat pagi jam sembilan pagi, jadi acara molor semua. Jadi sekarang saya minta pendapat dengan diwakilinya Menteri PPN/Kepala Bappenas oleh Sekretaris Utama dan juga dari BPKP diwakili oleh Sekretaris Utama. Mohon pendapat kalau memang diperbolehkan kita ketok sehingga kita bisa jalan. Dari sebelah kanan.

F-PPP (H.M. AMIR USKARA, M.Kes.):

Terima kasih Pimpinan.
Teman-teman Anggota Komisi XI.

Dari saya ingin mengatakan bahwa apakah keterwakilan dari masing-masing yang kita undang hari ini itu diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan. Karena kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan pengambilan keputusan ditarik kemudian itu mau dikonsultasikan lagi ya saya kira ngga bisa. Jadi sepanjang bisa mengambil keputusan saya kira nda ada masalah.

KETUA RAPAT:

Kita langsung tanya ya. Bapak diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan, yang dari BPKP, eh dari Bappenas.

SEKRETARIS UTAMA MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Ya Pak sepanjang terkait dengan RKA K/L dari Bappenas.

KETUA RAPAT:

Oh ya memang yang kita bahas RKA K/L. Yang dari BPKP?

SEKRETARIS UTAMA BPKP:

Ya, disampaikan tadi juga.

KETUA RAPAT:

Ya, jadi memang diberikan kewenangan penuh untuk mengambil keputusan sebatas berhubungan dengan RKA K/L, yang memang kita bahas hari ini adalah RKA K/L, setuju ya kita lanjutkan, setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Jadi kita lanjut.

Para hadirin yang terhormat,

Mengawali rapat hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sekjen BPK, Kepala BPS, Kepala BPKP dan Kepala LKPP dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga hal-hal yang akan kita bicarakan dan simpulkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara, *Aamiin*.

Agenda Raker dan RDP pada malam hari ini merupakan lanjutan dari Raker dan RDP yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2019 yang menyepakati untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI, dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PPN/Kepala Bappenas, BPK RI, BPS, BPKP dan LKPP tahun anggaran 2020. Jadi pertama sudah disampaikan semuanya ini ya pada rapat tanggal 29 Agustus, jawaban tertulis sudah disampaikan belum Pak? sudah. Kita review dikit, kami minta review dikit saja dari Saudara-Saudara sekalian ngga usah ngulang dari awal, jadi review dikit atas pertanyaan ya progres dari teman-teman kemudian baru kita ambil keputusan. Ya, kami persilakan, kita mulai dari Menteri Bappenas, Menteri PPN/Kepala Bappenas. Ya kami persilakan Pak.

SEKRETARIS UTAMA MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Terima kasih Pak Ketua sidang Komisi XI ini.

Saya mewakili Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara garis besar beberapa pertanyaan yang ditanya terkait dengan minggu lalu adalah bagaimana posisi Bappenas melihat perkembangan kedepan. Seperti pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Achmad Hatari melihat penyerapan anggaran Bappenas. Apakah dengan kondisi saat ini yang baru menyerap 43 persen apakah masih bisa untuk kita serap secara keseluruhan. Secara garis besar kami sampaikan dapat kami lakukan karena memang ada beberapa proyek sarana prasarana yang cukup besar, yaitu terkait dengan gedung dan juga penyiapan data center. Jadi pencapaian yang sekarang baru 48 persen ini bisa diperkirakan 95 persen. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan saya mencoba untuk yang langsung terkait dengan RKA K/L yaitu dan juga peran Bappenas mohon penjelasan mengenai program tahun 2020 tentang penguatan kemampuan perencanaan pemerintah daerah, karena melihat bahwa bagi Bappeda daerah ini masih adanya kemampuan yang masih perlu ditingkatkan dalam pengembangan regional daerah. Dalam upaya mendukung keberhasilan ini pencapaian tujuan pembangunan nasional penyelarasan perencanaan pembangunan menjadi kunci bagi sinergi pembangunan pusat dan daerah. Oleh karena itu beberapa yang kami usulkan untuk di tahun 2020 dalam hal penguatan perencanaan di daerah diantaranya program bina pembangunan daerah yang ada di Kementerian Dalam Negeri dengan komponen-komponen kegiatannya secara keseluruhan sampai penyelenggaraan Musrenbang Provinsi dalam penyusunan RKPP dan Musrenbangnas ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selalau kita bekerja mulai dari awal sampai akhir. Kemudian diantaranya juga ada pemberian bimbingan teknis melalui penyelenggaraan dekosentrasi

Kementerian PPN/Bappenas kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah dalam rangka meningkatkan sinergi perencanaan pusat dan daerah. Kemudian yang juga cukup penting adalah kami di Bappenas ini memiliki Pusat Pembinaan Diklat Perencanaan, dimana dalam hal ini kita juga meningkatkan kapasitas fungsional perencanaan melalui pemberian bea siswa yang ada di, perencanaan di daerah terutama di kantor-kantor Bappeda dan berbagai kantor dinas melalui pendidikan S.2, S.3 bahkan sampai di luar negeri tapi intinya adalah dalam kaitan perencanaan dan kebijakan publik dalam hal ini. Sebagai investasi penguatan perencanaan pembangunan dalam penyusunan RKP 2020 ini beberapa hal diantaranya juga kita lakukan menjaga konsistensi jumlah prioritas nasional dan program prioritas sampai kepada proyek-proyek yang ada di daerah. Itu inti dari yang kami sampaikan terkait pada dasarnya peran Bappenas Kementerian PPN kedepan. Terkait dengan beberapa pertanyaan yang menyangkut pemindahan ibukota, karena ada beberapa pertanyaan yang menanyakan bagaimana tentang berapa besar dana yang dibutuhkan dalam persiapan pembangunan ini. Kemudian juga ada terkait dengan masih juga ibukota karena kelihatannya banyak pertanyaan saat ini masih mengarah kepada hal ibukota. Saya minta mungkin dibidang regional Pak Rudi bisa menjelaskan intinya tentang pemindahan ibukota ini. Saya persilakan Pak Rudi, mohon ijin Pak Ketua supaya bisa langsung yang menjelaskan yang menangani.

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS/DIREKTUR TATA RUANG DAN PERTANAHAN (IR. RUDY SOEPRIHADI PRAWIRADINATA, MCRP.,Ph.D.):

*Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Yang terhormat Wakil Ketua Komisi XI,
Para Anggota yang terhormat Komisi XI.**

Ini saya jadi merespon apa yang disampaikan oleh DR. Achmad Hatari terkait dengan aset-aset yang ditinggalkan di Jakarta. Bagaimana kelanjutannya setelah ibukota pindah. Pada prinsipnya kedepan tentunya aset-aset yang ada di Jakarta akan dikelola nanti dengan kelembagaan yang akan dibentuk khusus nanti akan dikelola, karena aset-aset yang di Jakarta itu begitu apa namanya begitu bernilai tinggi, di sekitar Monas kemudian Thamrin dan Kuningan semuanya mempunyai nilai yang tinggi nanti akan dikelola pengelolaannya bisa berbagai alternatif. Ada yang bisa di nanti kedepan bisa dengan operasional transfer kemudian bisa disewakan, itu beberapa alternatif. Memang kita belum mendetailkan seperti apa karena kita waktu melakukan kajian ini masih relatif dengan tiga lokasi, dan kita belum tahu seperti apa keputusannya. Sekarang ini begitu diputuskan oleh Pak Presiden kita kedepan akan melakukan kajian selama tiga bulan pendalaman yang lebih detail lagi mengenai kajian kedepannya. Nah itu kurang-lebih nanti alternatif-alternatif itu akan kita koordinasikan bersama dengan Dirjen Keuangan Negara dengan LMAN dan lain-lain untuk memastikan bagaimana strategi kedepannya. Kemudian yang kedua terkait pertanyaan dari Bapak Mukhamad Nur Purnomosidi terkait dengan pembiayaan alternatif satu dan dua. Secara prinsip

sebetulnya APBN yang nanti digunakan kurang-lebih sekitar 19,2 persen baik itu alternatif satu maupun alternatif dua. Jadi pembiayaan lain melalui KPPU dan PINA. Nah ini kemudian tahapan-tahapan juga nanti kita seperti saya sampaikan tadi di 2019 kita akan perdalam mengenai kajian itu untuk khusus lokasi di Kalimantan Timur, kemudian nanti 2020 kita mempersiapkan *masterplane* dan urban disainnya termasuk tentunya di 2019 ini kita mulai naskah akademis kita sudah mulai untuk menyiapkan RUU nanti bersama dengan DPR. Kemudian nanti direncanakan 2021 sudah mulai *ground braking*, dan kita harapkan nanti di 2024 sudah mulai pemindahan beberapa lembaga yang sangat terkait yang sangat misalnya seperti Kementerian PU kemungkinan karena untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik. Kemudian terkait kajian tadi ditanyakan juga oleh Bapak Chaerul Saleh apakah kajian ini dilakukan dengan serius, tentunya demikian Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya kita mulai kajian ini di 2017 Pak begitu pemerintah eh Presiden menugaskan Kepala Bappenas untuk mempersiapkan ini kami sebetulnya bukan tidak melakukan ini sendiri tapi kita berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dengan ...(suara tidak jelas) dengan KLHK, dengan Badan Geologi Nasional, dengan Kementerian ESDM, Polri dan Hankam. Kami bekerjasama dengan semua mitra terkait untuk ...(suara tidak jelas) kajian-kajian ini. Sebetulnya kita sudah menyampaikan juga beberapa alternatif yang memang yang diputuskan adalah pindah keluar Jawa dan ditetapkan di Kalimantan khususnya Kalimantan Timur. Alternatif lain adalah sebetulnya kita juga mempersiapkan tetap di Jakarta dengan membentuk Government Distrik, dimana semua kantor pemerintah dialihkan ke sekitar istana, dan tentu nanti ada pengalihan kesana. Memang ada kekurangan kelebihannya banyak kekurangan kelebihannya disamping kesulitan-kesulitannya karena itu untuk terutama untuk meningkatkan efisiensi efektifitas pemerintahan, namun kesulitannyapun banyak dan juga tidak menyelesaikan beberapa isu yang terkait dengan

F-PKS (H. REFRIZAL):

Bisa interupsi ngga Pak Ketua?

Saya mau interupsi.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PKS (H. REFRIZAL):

Pindah ibukota memang Jakarta kenapa Pak?

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS/DIREKTUR TATA RUANG DAN PERTANAHAN (IR. RUDY SOEPRIHADI PRAWIRADINATA, MCRP.,Ph.D.):

Mungkin kalau boleh.

F-PKS (H. REFRIZAL):

Ada apa dengan Jakarta?

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS/DIREKTUR TATA RUANG DAN PERTANAHAN (IR. RUDY SOEPRIHADI PRAWIRADINATA, MCRP.,Ph.D.):

Baik, sebenarnya ada beberapa

F-PKS (H. REFRIZAL):

Itu pertama. Yang kedua undang-undangnya belum ada. Nanti seandainya undang-undangnya tidak disetujui apa bisa kita pindah, jangan gegabah Pak, mindahkan rumah saja sudah susah kita, BPJS masalah sekarang, yang lain bermasalah, jangan terlalu bikin Bapak senanglah. Betul-betul kita kajiannya matang gitu Pak, kaya gampang-gampang saja pindah ibukota gitu. Kecuali Bapak pindahnya, ini pindahnya jauh Pak nyeberang pulau, perbatasan negara lain itu, ngga main-main Pak. Saya kira Bapak main-main saja tadi itu pindah ibukota, kalau main-main ngga apa-apa, buat kajian yang betul, apa masalahnya dengan Jakarta sehingga kita pindahkan ibukota dari Jakarta ini, apa masalahnya. Kalau padat pembangunan kita pindahkan saja pembangunan kesana, apa susahya. Saya belum jelas yang disampaikan alasan-alasan pindah itu belum jelas bagi saya itu sampai sekarang sebagai Anggota DPR. Kita ditanya Pak, di daerah-daerah benaran kita pindah Pak, serius ini kita pindah. Pindah rumah saja susah Pak. Orang kalau punya duit lebih bangun rumah gede ...(suara tidak jelas) pindah baru bisa itu, duitnya banyak, ini hutang banyak, mau pindah lagi gaya-gayaan lagi kita ini. Coba dipikirkan matang Pak, berikan masukan matang kepada Presiden. Jangan asal berikan masukan, ...(suara tidak jelas) Bapak senang Presiden.

Terima kasih.

Wassalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Lanjut, sudah cukup ya.

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS/DIREKTUR TATA RUANG DAN PERTANAHAN (IR. RUDY SOEPRIHADI PRAWIRADINATA, MCRP.,Ph.D.):

Untuk melanjutkan sedikit Pak. Apa saya respon langsung apa lanjutkan dulu ya Pak ya. Baik, dan itu coba beberapa alternatif yang kita siapkan sejak 2017 Pak jadi kita betul-betul melakukan kajian ini secara mendalam. Jadi alternatif pertama Government Distrik itu Pak. Yang kedua adalah memindahkan ibukota ke sekitar Jakarta, seperti dulu pernah ada juga wacana ke Jonggol, dan juga apa namanya Maja ibukota disekitar Tangerang. Nah tapi itupun sama setelah kita analisis dengan beberapa hal ada kekurangan kelebihanya.

Kemudian

KETUA RAPAT:

...(suara tidak jelas) sudah diputus Pak ke Kalimantan Timur.

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS/DIREKTUR TATA RUANG DAN PERTANAHAN (IR. RUDY SOEPRIHADI PRAWIRADINATA, MCRP.,Ph.D.):

Sudah, untuk itu saya mau menyampaikan sebetulnya sebelum diputuskan ada beberapa alternatif

KETUA RAPAT:

Ngga usah itu sudah tahu sudah lama, kita konsentrasi ke RKA K/L saja, entar mbulet lagi nanti ini.

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS/DIREKTUR TATA RUANG DAN PERTANAHAN (IR. RUDY SOEPRIHADI PRAWIRADINATA, MCRP.,Ph.D.):

Baik Pak, kalau begitu nanti seperti saya sampaikan Pak nanti 2020 kita lebih mempersiapkan ke masterplane dan urban disain.

KETUA RAPAT:

Yang harus disiapkan adalah bagaimana Menteri PPN menyiapkan rancangan undang-undang dulu, dibahas dengan DPR, ya kan Undang-Undang IKN dan menyabut Undang-Undang IKN DKI Jakarta tahun 1970, kalau itu sudah kelar baru bicara dengan DPR mengenai perencanaan anggaran, baru kajian mengenai Kalimantan Timur ibukota itu mana dulu yang dimulai dan sebagainya dibicarakan dengan DPR. Jadi jangan, jangan dilanjutkanlah nanti kalau ngga ini mbulet nanti ya. Saya kira itu rancangan undang-undangnya dulu diserahkan ke DPR nanti mungkin masa yang akan datang.

Silakan lanjut kalau memang ada yang lain.

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS/DIREKTUR TATA RUANG DAN PERTANAHAN (IR. RUDY SOEPRIHADI PRAWIRADINATA, MCRP.,Ph.D.):

Sudah cukup Pak, demikian.

Terima kasih.

SEKRETARIS UTAMA MENTERI BPN/KEPALA BAPPENAS:

Demikian Pak Ketua sidang dan Anggota Komisi XI yang saya hormati. Khusus tadi catatan atau pertanyaan dari Pak Refrizal kami catat dan akan kami sampaikan supaya memperkuat alasan dasar yang jelas bagaimana kita

memindahkan ibukota ini, terkait juga dengan kesiapan kita untuk Rancangan Undang-Undang Ibukota terkait juga dengan Undang-Undang Ibukota yang ada sekarang ini kita selesaikan dulu, baik.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Sekjen BPK.

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Pimpinan, mohon ijin interupsi Pimpinan.

Saya ingin mengomentari sedikit mengenai RKA K/L PPN ini. Kita semua sudah mendapatkan penjelasan dari Presiden ya pemerintah. Kalau fokus 2020-2024 ini merupakan periode kedua dari Presiden Jokowi ini fokusnya kepada pembangunan sumberdaya manusia. Tetapi memasuki periode kedua ini saya kok tidak melihat Bappenas sebagai ting-tang republik kita yang kita cintai ini memaparkan roadmap atau kajian yang lebih rinci dan lebih baik tentunya dibanding periode yang lalu mengenai pembangunan sumberdaya manusia itu sendiri, kita itu mau kemana mau berbuat apa. Karena kita sudah dua puluh tahun ya empat periode menerapkan Undang-Undang Dasar yang mengamanatkan APBN untuk pendidikan ini dua puluh persen. Tetapi kita tanpa disadari kinerja dari sektor pendidikan ini ternyata belum berhasil, terbukti kita sekarang masih memfokuskan diri pembangunan SDM. Berarti dua puluh tahun kita dengan APBN yang begitu besar mubazir. Kenapa ini tidak dijadikan cermin kegagalan dua puluh tahun ini, malah kita seolah-olah sekarang disibukan Bappenas ini hanya soal pemindahan ibukota. Padahal pemindahan ibukota ini kalau kita melihat kemampuan financial kita sebetulnya bukan saat yang tepat sebetulnya. Dengan lima ratus triliun atau empat ratus triliun, walaupun APBN nanti persentasenya hanya dua puluh persen, inipun juga tidak logis. Masa pemerintah menyewa fasilitas ke swasta, sudah ngga masuk akal. Kita sudah punya rumah sekarang ini ya kepemilikan pemerintah, mau pindah rumah tapi ngontrak, sangat tidak masuk akal.

Oleh karena itu cobalah tolong paparkan PPN ini roadmap pendidikan atau pembangunan sumberdaya manusia nanti seperti apa. Jangan kita menghambur-hamburkan anggaran untuk sesuatu yang apa tidak ada hasilnya outcomenya sama sekali tidak kelihatan. Ya pengalaman dua puluh tahun ini sudah cukuplah jangan diulang lagi. Nah ini yang paling menentukan adalah Bappenas karena disini adalah pusat para pemikir pembangunan nasional ada disitu. Tapi saya dari paparan saat konsinyir juga tidak keluar itu. secara konkret ya rencana yang rinci dan terukur nantinya hasilnya. Saya tidak melihat itu, bagaimana kita bisa menyetujui rencana kerja Bappenas ini walaupun jumlahnya tidak signifikan ya hanya berapa satu koma delapan atau satu koma embilan tadi. Kalau kita tidak punya roadmap pembangunan sumberdaya manusia yang apa ya yang baiklah saya khawatir akan terulang lagi pengalaman dua puluh tahun ini, kita menghambur-hamburkan uang saja tanpa hasil. Pada gilirannya kita tidak akan memiliki daya saing yang seperti kita harapkan terhadap sumberdaya manusia kita.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya kira belum sesi pertanyaan ya. Jangan dijawab dulu nanti sekalian jadi satu saja.

Silakan Sekjen BPKP, eh BPK.

SEKJEN BPK:

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat petang dan salam sejahtera untuk kita semua.*

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI,

Perkenankan kami menyampaikan penjelasan secara umum terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pada pertemuan sebelumnya, pada RDP sebelumnya. Dalam hal ini ada beberapa paling tidak ada enam point yang kami catat dan sudah kami sampaikan secara tertulis jawaban. Namun perkenankan kami menyampaikan secara umum penjelasan sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan tindak-lanjut rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti yang disampaikan oleh Pak Hatari yang terhormat. Dan perlu kami sampaikan memang diantara hasil pemantauan tindak-lanjut selain yang selesai sesuai rekomendasi, kemudian belum sesuai rekomendasi, sudah dilakukan tapi belum selesai, dalam proses. Kemudian yang belum ditindaklanjuti dan ada yang tidak dapat ditindaklanjuti. Perlu kami sampaikan memang prosentasenya kecil satu persen yang tidak dapat ditindaklanjuti. Hal ini disebabkan pertama karena kondisi *force majeure* atau kondisi kahar, diantaranya bencana alam, bisa terjadi bencana alam seperti di daerah NTB, misalnya ada beberapa aset yang hilang dan sebagainya yang dulu pernah menjadi temuan BPK kondisinya sudah berubah karena kondisi kahar, sehingga hal ini menyulitkan bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi yang sebelumnya pernah diberikan. Nah kami akan melakukan pemeriksaan kembali setelah kondisi kahar, dan apabila permasalahan itu ditemui kembali maka akan diberikan rekomendasi yang baru tetapi rekomendasi yang lama terpaksa masuk ke klasifikasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Selain itu juga karena kondisi bahwa ada perubahan organisasi. Jadi ada perubahan organisasi apakah pembubaran atau penggabungan yang barangkali perlu melihat kembali apakah memang bisa ditindaklanjuti oleh organisasi yang baru tersebut. Dan yang ketiga orang atau subyek yang melaksanakan yang seharusnya melaksanakan rekomendasi itu terkena kasus di pengadilan, misalnya proses pengadilan. Ini menyulitkan untuk pelaksanaan rekomendasi tersebut, sehingga diajukan secara proses kepada BPK untuk diteliti kemudian akan kami ajukan kepada Pimpinan BPK apakah kondisi seperti ini layak untuk diberikan tidak dapat ditindaklanjuti, dan memang prosentasenya sangat kecil satu persen.

Kemudian yang berikutnya adalah bentuk-bentuk kegiatan yang dapat mengoptimalkan anggaran BPK. Kami sudah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya pengendalian-pengendalian belanja yang apa namanya telah kami lakukan di tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya dalam alokasi dan pelaksanaan anggaran BPK kami mencoba untuk melakukan kegiatan pengendalian biaya perjalanan dinas. Secara khusus misalnya untuk walaupun secara ketentuan Menteri Keuangan misalnya ke luar negeri lebih dari delapan jam bisa menggunakan fasilitas bisnis maka kami mencoba untuk mengatur kembali. Untuk tingkatan auditor misalnya staff walaupun diatas delapan jam kami coba tetap menggunakan fasilitas ekonomi, ya ini contohnya seperti itu. Kemudian juga pengendalian biaya rapat di luar kantor, konsinyering-konsinyering kami mencoba untuk memampatkan, menggabungkan sehingga bisa lebih optimal anggarannya. Demikian juga pengendalian biaya rapat didalam kantor, kemudian biaya konsumsi rapat yang biasanya cukup besar kita coba efisienkan, dan juga mencoba untuk memprioritaskan pengadaan dari dan pemeliharaan barang milik negara. Ini yang coba kami laksanakan, selain juga kami mencoba untuk melaksanakan kegiatan seperti penyelenggaraan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, SPM elektronik dan seterusnya.

Ini terkait dengan kegiatan optimalisasi pemanfaatan anggaran. Dan untuk yang ketiga terkait dengan bagaimana efektifitas opini BPK terhadap laporan keuangan kementerian negara lembaga. Kami perlu sampaikan bahwa opini atas LKKL dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh pemerintah pusat semakin meningkat sudah sembilan puluh empat persen kementerian negara lembaga yang sudah memperoleh opini meskipun masih dibawah target RPJMN yaitu sembilan puluh lima persen. Namun demikian opini ini memiliki manfaat untuk mengukur kualitas dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan menjadi tolok ukur pengukuran pelaksanaan reformasi birokrasi keuangan negara. Dengan demikian target untuk efektifitas opini ini paling tidak kementerian sudah mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola dan dilaksanakannya. Nah pada tahap berikutnya memang mengukur kualitas dari belanjanya ini perlu pemeriksaan jenis yang lain yaitu pemeriksaan kinerja yang akan terus ditingkatkan oleh BPK. Kemudian terkait dengan bentuk pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan dalam hal ini BPK telah dibekali dengan standard pemeriksaan dan juga standard-standard terkait metodologi atau sistem pengendalian mutu yang telah ditetapkan. Dan kami apabila ada pelanggaran kode etik telah dibentuk majelis kode etik, tiga anggota dari luar, dari akademisi, profesi dan kemudian dua anggota dari unsur Pimpinan BPK. Dan ini sudah bekerja dan beberapa hal sudah apa beberapa pelanggaran kode etik sudah diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian juga kami melaksanakan atau menyelenggarakan *whistleblowing system* yang ada di BPK untuk menyediakan akses kepada teman-teman di BPK apabila ada informasi mengenai pelanggaran-pelanggaran yang perbuatan yang melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan dan kode etik serta standard bisa dilaporkan kemudian diproses secara ketentuan didalam BPK sendiri. Ini yang bentuk-bentuk model pengendalian dan kegiatan pemeriksaan BPK.

Kemudian untuk realisasi anggaran tahun 2019 perlu kami sampaikan sudah terserap 61,21 persen di tahun 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019,

dan kami akan terus mencoba mengoptimalkan dan meningkatkan realisasi penyerapan anggaran ini. Dan tahun lalu sudah mencapai 97 persen untuk tahun 2018, dan *Alkhamdulillah* mendapatkan apa namanya penghargaan dari Kementerian Keuangan terkait dengan realisasi anggaran BPK. Kemudian penjelasan terkait dengan tambahan anggaran kami juga menyampaikan tambahan anggaran sebesar usulan tambahan anggaran kami sebesar 860 miliar ini sebenarnya usulan dari awal yang belum mendapat persetujuan di pagu indikatif kemudian di pagu APBN. Dan jumlah ini digunakan untuk peningkatan jumlah dan kualitas LHP khususnya LHP investigatif karena permintaan dari aparat penegak hukum dalam kasus-kasus kerugian negara yang terus meningkat ke BPK. Kemudian juga peningkatan kapasitas Badan Diklat yang sekarang sudah menjadi eselon satu dari dulu Pusat Diklat pusat pendidikan dan pelatihan sekarang menjadi Badan Diklat. Dan untuk menopang sarana prasarana dan juga pengembangan kurikulum dan seterusnya kami usulkan anggaran 94 miliar. Demikian juga untuk peningkatan kapasitas teknologi informasi yang khususnya untuk *mobile working inferment* karena pemeriksa kita remud banyak di perwakilan dan seterusnya kami membutuhkan aplikasi untuk mengendalikan pemeriksaan dan menggunakan teknologi inforasi, demikian juga untuk *disaster recovery center* karena data-data pemeriksaan bersifat rahasia dan perlu dijaga untuk maintenance dan peningkatan kapasitas DRC kami perlu ditingkatkan dan kegiatan IT lainnya. Demikian juga sarpras dan juga peningkatan tatakelola organisasi BPK sebagai bagian dari pengembangan organisasi BPK. Secara umum demikian Pimpinan dan Anggota Komisi XI.

Terima kasih.

Wassalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Lanjut Kepala BPS.

KEPALA BPS:

Assalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang terhormat Bapak Pimpinan,
Bapak-Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI.**

Ada empat pertanyaan yang diajukan kepada BPS. Yang pertama adalah harapan dari Pak Achmad Hatari, beliau mengajak kita semua untuk memberikan perhatian penuh kepada kualitas SDM Indonesia. Jadi harus diakui bahwa salah satu permasalahan utama yang kita hadapi adalah kualitas SDM yang masih rendah. Kalau kita lihat pada posisi tahun 2019 jumlah penduduk pekerja yang berpendidikan SD kebawah itu memang masih 40,51 persen, dengan alasan itulah pemerintah lima tahun kedepan akan menekankan pada peningkatan SDM unggul. Tetapi kalau kita lihat perkembangannya sejak tahun 2014 sebetulnya ada progres disana, dimana

jumlah penduduk bekerja menurut SD menunjukkan penurunan, sementara yang berpendidikan universitas ataupun SMK menunjukkan peningkatan. Yang kedua adalah pertanyaan dari Pak Amirul Tamim, beliau menanyakan variabel apa saja yang akan kita kumpulkan didalam sensus penduduk 2020. Jadi sensus penduduk 2020 ini nanti akan kita laksanakan dalam dua tahap, tahap pertama adalah tahun 2020. Disana nanti akan kita lakukan melalui tiga metode melalui online, kemudian juga menggunakan tablet dan masih menggunakan kuisioner kertas untuk daerah-daerah yang belum ada internetnya. Ada tahap pertama disana ada sembilan belas pertanyaan yang kita cakup. Ada sepuluh pertanyaan mengenai variabel individu, kemudian tiga pertanyaan mengenai pekerjaan, satu pendidikan dan kemudian lima pertanyaan mengenai perumahan. Untuk melakukan ini nanti kita akan bekerjasama dengan Dukcapil dengan tujuan untuk mewujudkan satu data kependudukan yang diharapkan kedepan akan kita mintin terus sehingga itu nanti dimanfaatkan untuk membuat kebijakan di berbagai sektor. Kemudian di tahap kedua akan kita ambil sampel dan disana nanti akan kita tanyakan delapan puluh dua pertanyaan yang rinci, dimana ada tiga belas pertanyaan mengenai individu, sembilan belas pertanyaan mengenai migrasi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan fertilitas dan mortalitas. Kembali tujuannya adalah menyediakan data yang rinci untuk membuat berbagai kebijakan diberbagai bidang. Dan salah satu manfaat dari sensus penduduk ini nanti adalah membuat proyeksi penduduk yang sangat penting karena kita perlu memikirkan kedepan.

Sensus penduduk yang terakhir digunakan untuk membuat proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2045 dengan hasil ini nanti kita bisa memanjangkan proyeksinya sampai dengan tahun 2060, karena kedepan banyak hal yang perlu kita antisipasi, misalnya untuk tahun 2045 nanti jumlah Manula tiga kali lipat dari sekarang. Sehingga pertanyaannya apakah kita siap untuk menghadapi tahun 2045 yang harus kita pikirkan dari sekarang. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan dari Pak Chaerul Saleh beliau menanyakan terobosan apa yang dilakukan BPS untuk mengefisiensikan anggaran sensus penduduk. Jadi yang pertama kita akan menggunakan data dari Dukcapil untuk menuju satu data kependudukan. Dengan adanya sensus penduduk ini nanti kita bisa mendeteksi jumlah penduduk menurut KTP atau de jure dan jumlah penduduk secara de facto atau mengenai tempat tinggal. Ini dua-duanya diperlukan baik dari sisi administrasi maupun kebijakan. Kemudian untuk mengefisiensikan anggaran kita pertama akan menggunakan sensus penduduk online, kita perlu menghimbau masyarakat untuk mengupdate dirinya sendiri. Karena ini masih permulaan tentunya kita berharap masyarakat berpartisipasi, meskipun mungkin targetnya tidak kita pasang tinggi karena ini pertama kali kita perlu memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa mengupdate dirinya sendiri adalah sangat penting. Kita akan juga menggunakan KP dimana kita akan menggunakan tablet maupun handphone. Kemudian untuk daerah-daerah yang masih sulit akses internetnya terutama di daerah timur kita masih akan menggunakan kuisioner. Pertanyaan terakhir adalah dari Bu Indah Kurnia. Bu Indah menyarankan supaya statistik pengunjung *website* BPS ditunjukkan secara realtime. Dan saran dari Bu Indah sudah kita tindaklanjuti. Sekarang kalau kita lihat di webnya BPS disana bisa dilihat jumlah pengunjung website BPS sampai dengan posisi bulan Juli 2019.

Jadi sudah kita tindaklanjuti terima kasih sarannya Bu Indah. Dan dari situ kita juga bisa melihat data-data apa yang paling diminati oleh pengunjung. Misalnya yang paling populer adalah data pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kemiskinan. Yang kedua Bu Indah juga menanyakan mengenai IGU BPS tahun 2018, kembali IGU itu bisa di download dari internet dengan judul laporan kerja BPS tahun 2018, itu adalah posisi yang terakhir.

Demikian Bapak, terima kasih.

Wassalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Lanjut Saudara Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

SEKRETARIS UTAMA BPKP:

Baik.

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi XI yang hadir pada malam hari ini.

Ijin menyampaikan tanggapan tertulis kami yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekilas mungkin tidak terlalu detail. Pertama dari Pak Achmad Hatari, terima kasih atas konsen Bapak Pak khususnya untuk implementasi Siskedes di beberapa provinsi khususnya Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat masih rendah. Memang kami sudah melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis Pak tapi implementasinya memang agak berat. Kompetensi SDM desa masih terbatas, dan kemungkinan ada penggantian SDM yang sudah kita latih diganti orang lain, sehingga ini jadi seperti dari mulai lagi. Kemudian sarana prasarana yang dimiliki belum menunjang, khususnya dalam hal penyediaan listrik dan komputer untuk daerah-daerah tertentu, serta ini mungkin yang umum kesulitan jangkauan geografis untuk dilakukan pembinaan secara langsung Pak karena sumberdaya kami juga terbatas. Kemudian juga terkait dengan kapabilitas APIP memang kami terus mendorong untuk bisa efektifitas keberadaan APIP ini melalui upaya bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP kepada pemerintah provinsi kabupaten/kota. Kemudian memfasilitasi konsultasi baik via media elektronik maupun *couching klinik* di seluruh perwakilan BPKP di seluruh Indonesia Pak. Kemudian terkait dengan slide paparan sembilan ada beberapa realisasi output yang belum mencapai lima puluh persen, khususnya karena ada beberapa penugasan yang tergantung pada kementerian lain Pak, instansi yang terkait. Dan sebagian besar memang ada yang baru diselesaikan di triwulan ketiga dan keempat. Jadi realisasi outputnya nanti selesai di triwulan tiga dan empat. Kemudian di Maluku Utara dan Kalimantan Tengah mengenai Kantor BPKP Pak. Sejak 2011 Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Perwakilan

BPKP Provinsi Maluku Utara dan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sudah beroperasi dan aktif membantu di wilayah dua wilayah tersebut. Mulai tahun 2011 tersebut kedua perwakilan beraktifitas dengan menggunakan Gedung Kantor Ex Kantor Penghubung. Jadi waktu sebelum pemekaran kami mendirikan Kantor Penghubung untuk transit teman-teman yang bertugas, karena nah begitu pemekaran kami masih menggunakan gedung seperti itu, jadi masih sangat terbatas. Mungkin Bapak sering mampir kesana itu masih kurang memadai. Dan atas dukungan dari Bapak Ibu sekalian *Alkhamdulillah* di 2020 sudah masuk di anggaran ini Pak, sehingga di dua tahun kami rencanakan 2020 dimulai 2021 diselesaikan.

Kemudian Pak Nur Purnamasidi terkait dengan porsi anggaran dukungan management sangat besar dibanding pengawasan. Kami memang sebagai lembaga pengawasan sebagian besar anggaran dialokasikan untuk belanja pegawai, jadi sekitar 78 persen untuk belanja pegawai, belanja operasional dan modal sarana prasarana, sehingga dibanding pengawasan seperti kelihatan njomplang Pak. Kemudian dari Pak Amirul Tamim mengenai fokus ke dana desa ijin menyampaikan tugas pengawasan dana desa sebetulnya adalah kewajiban aparat pengawasan intern pemerintah di masing-masing Pemda yang mempunyai desa. Namun demikian kami juga memberikan *eliwarning system* terkait dengan pengelolaan dana desa. Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan yaitu mengkoordinir pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern dari daerah tersebut secara triwulanan dan kami sudah memfasilitasinya hasil reviewnya melalui aplikasi yang bersifat online Pak. Kemudian kami juga melaksanakan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan dana desa yang dilaksanakan secara sampling tentu saja tidak bisa keseluruhan desa di seluruh Indonesia. Kemudian juga kami mengembangkan sistem pengawasan keuangan desa, istilah kami Siswaskides yang kami kembangkan bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, jadi mengikuti Siskudes kita juga mengembangkan aplikasi Siswaskides. Saat ini sedang dalam tahap uji coba Pak mudah-mudahan tahun ini akhir tahun ini bisa dilaksanakan. Kemudian Pak Chairul Shaleh memberikan dorongan dukungan untuk bisa direkomendasikan agar Siskudes diwajibkan oleh Kemendagri di seluruh Indonesia. *Alkhamdulillah* Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat nomor 412.25942/BPD tanggal 28 Agustus 2019 tentang rilis terbaru aplikasi Siskudes versi 202 yang merupakan aplikasi Siskudes resmi pemerintah yang ditujukan kepada para gubernur, bupati dan walikota. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong semua Pemda didalam mengimplementasikannya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan BPKP.

Terima kasih.

Wassalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Dari BPKP ini di halaman terakhir ini disebutkan untuk Indah Kurnia kami dari Fraksi PDI Perjuangan satu lagi mungkin ada Pak Hery Gunawan dari Fraksi Gerindra. Pertanyaan yang disampaikan tidak terkait dengan BPKP. Coba Pak sampaikan pertanyaan saya apa, saya juga lupa. Kalau terlalu banyak ini, saya lagi-lagi ditanya sama sekretariat belum dapat saya rakamannya. Saya tanya apa terus dianggap tidak perlu dijawab karena tidak sesuai tidak ada kaitan dengan BPKP. Harusnya disampaikan disini pertanyaan saya apa. Terus kalau memang ngga terkait itu ya nanti saya lihat, saya sendiri lupa tanya apa saya.

KETUA RAPAT:

Cari dulu Pak ya. Kita lanjutkan dulu Bu Indah ya ke Kepala LKPP, kami persilakan.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Ngga pernah Pimpinan ada seperti gini laporan itu dari mitra kerja kok disebutkan begini ngga ada kaitan.

KEPALA LKPP:

Terima kasih Pimpinan sidang.

Bapak Ibu Anggota Komisi XI yang kami hormati.

Sebagaimana yang telah kami sampaikan secara tertulis pertanyaan dari Ibu Indah Kurnia terkait dengan target penggunaan E-Prokument yang mencapai 80 persen pada tahun 2019, apakah ini sudah berhasil sehingga perlu dijelaskan bentuk keterbukaan terhadap publik. Berdasarkan data smart report LKPP pelaksanaan penggunaan E-Prokument terhadap belanja negara pada tahun 2018 sebesar 411,5 triliun, atau baru 39,56 persen. Angka tersebut didapatkan dari perhitungan dari total transaksi E-Tendering dan E-Purcesing dibandingkan dengan total belanja pengadaan hasil pengelolaan data sistemontepeler dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yaitu sebesar 1.040,1 triliun. Capaian tersebut walaupun baru mencapai 80 persen mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang sebelumnya 33,4 persen. Pelaksanaan penggunaan E-Prokument terhadap belanja negara memiliki beberapa kendala. Yang pertama kepatuhan dari kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dalam mengumumkan rencana pengadaan pada aplikasi sistem rencana umum pengadaan (SIRUP). Pada tahun 2018 baru mencapai 824,9 triliun atau yang diumumkan baru 79 persen dari total belanja pengadaan. Mengapa hanya 39,56 yang kita sebut E-

Prokrument, karena dari sebagian anggaran 628 triliun itu dilakukan dengan menggunakan belanja pengadaan langsung atau pengadaan dengan metode swakelola yang belum dapat diidentifikasi melalui sistem E-Prokrument. Data SIRUP bisa memantau 79 persen, tapi pada saat implementasi sebagian kementerian/lembaga pemerintah daerah menggunakan pengadaan langsung atau swakelola. Untuk mendorong penggunaan E-Prokrument dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah LKPP telah melakukan pembaruan dan mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik SPSE versi yang terbaru yaitu SPSE versi 4.3 yang selaras dengan Perpres 16 tahun 2018 sehingga dimungkinkan adanya pencatatan pengadaan langsung pengadaan melalui metode swakelola berdasarkan E-Kontrak. Selain itu LKPP juga berupaya meningkatkan cakupan transaksi E-Purcesing dengan mendorong terbentuknya katalog sektoral maupun katalog lokal dalam pencapaian strategi sebagai bagian yang tidak terpisahkan strategi nasional pencegahan korupsi sebagai tindak-lanjut Perpres nomor 54 tahun 2018.

Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah baik melalui E-Tendering, E-Purcesing maupun pengadaan secara langsung dan swakelola. Pertanyaan yang kedua dari Bu Indah terkait dengan target pertumbuhan penyedia barang jasa pemerintah hanya sebesar 5 persen hal ini dikatakan kurang begitu memiliki effort dalam pencapaiannya. Realisasi saat ini dapat kami jelaskan berdasarkan laporan capaian LKPP tahun 2018. Pertumbuhan penyedia yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa mengalami pertumbuhan sebesar 11,74 persen. Capaian tersebut kalau kita ambil dari 5 persen kita bandingkan memang terlalu tinggi 234 persen dari 5 persen mencapai 11,74 persen. Peningkatan capaian tersebut merupakan kinerja LKPP yang dilakukan secara konsisten dan melakukan pengenalan kebijakan, metode beserta pelatihan tender cepat secara nasional kepada pelaku pengadaan yang mengakibatkan database penyedia yang ada dalam aplikasi sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP) jumlahnya meningkat sangat pesat. Pertanyaan kedua yang terhormat dari Bapak DR. Achmad Hatari terkait dengan usulan tambahan anggaran LKPP tahun 2020, terkait penggunaan sistem infrastruktur IT pengadaan nasional sebesar 54,5 miliar yang diperuntukan untuk peremajaan infrastruktur dan sistem untuk internal maupun eksternal LKPP. Berdasarkan hal tersebut akan memperhatikan masa manfaat dari aset yang akan diremajakan dan hal tersebut harus mengikuti aturan yang berlaku. Dapat kami sampaikan Bapak, seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat LKPP dituntut untuk selalu dapat beradaptasi, berinovasi. Karena itu otomatis berdampak pada kebutuhan peremajaan infrastruktur IT yang kami adakan tahun 2015, server kami sekarang juga sudah sangat penuh, kami harus pindah tir tiga ke tir empat, sehingga usulan tambahan tersebut akan digunakan untuk menggantikan beberapa aset yang sudah hampir habis umur masa manfaatnya dan meningkatkan kapasitas dan data center LKPP dalam melakukan peremajaan dan peningkatan ...(suara tidak jelas) tersebut tentunya kami juga akan mengacu kepada aturan yang berlaku, apakah aset-aset tersebut masih bisa dioptimalkan atau memang lebih efisien dan efektif apabila kita remajakan. Demikian Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota yang terhormat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Saudara sekalian, mitra kerja kita ini ada lima mitra kerja ini sudah, dulu sudah kita sampaikan pertanyaan kemudian menjawab secara tertulis. Dari jawaban tertulis dari mitra kerja kita ini juga sudah menyampaikan jawaban-jawaban yang apa untuk menjawab pertanyaan yang kemarin disampaikan pada tanggal 29. Nah sekarang kalau ada pertanyaan lanjutan kami persilakan. Kalau masih ada pertanyaan lanjutan, tadi pertanyaan lanjutan disampaikan oleh Pak Hary ya, tolong itu dicatat untuk PPN. Kemudian tadi Bu Indah tadi maksudnya apa itu, mungkin maksudnya pertanyaan bukan untuk Bapak kali, pertanyaan untuk yang lain mungkin maksudnya itu. Kalau seandainya ini kalau Bu Indah ngga bertanya untuk BPKP kenapa mesti BPKP nyari-nyari pertanyaan, ya ngga perlu dijawab disitu, Pak Hary tidak terkait dengan, ya bukan maksudnya itu mungkin pertanyaan bukan untuk BPKP, untuk yang lain. Kami persilakan Bu, Bu iya.

F-PDIP (Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.D.E.):

Terima kasih.

Saya hanya mengusulkan ya bahwa kalau bisa semuanya konvergen. Kalau pemerintah memfokuskan kepada tema untuk meningkatkan HDI yang akan datang, dan saya gembra BPS juga sudah menyampaikan ancaman terhadap target meningkatkan HDI itu berupa perkawinan dini misalkan, maka menurut saya seluruh lembaga ataupun terutama BPK kelak ketika menyusun tentang rencana untuk audit mohon menyesuaikan dengan tema utama di Nawacita tersebut. Jadi kemudian semuanya itu bisa seperti apa vektor gitu Pak ya, simultan begitu, jadi dikeroyoklah untuk meningkatkan HDI itu. Tadi sudah ada konsen dari Pak Hary sebetulnya roadmapnya seperti apa kemudian target yang sudah disampaikan Bappenas naik HDI-nya tujuh koma berapa. Nah kemudian BPK kalau mau audit kinerja yang temanya itu juga. Jadi nanti kelihatan sekali dampaknya itu bisa diakselerasi ya oleh keroyokan semuanya itu. Jadi mekanisme yang selama ini terpisah menurut sailo-sailo itu mbok coba oleh Bappenas itu disinkronkan begitu. Bisa ngga diadakan komunikasi antar sailo-sailo itu sesuai dengan tema utama didalam Nawacita yang akan datang. Mungkin itu Pak usulan dari saya Pak, bukan pertanyaan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Itu usulan tadi.

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Pak Harry.

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Terima kasih Pimpinan.

Ada satu hal yang ingin saya konfirmasikan lagi kepada BPKP ya. Pada waktu kita rapat anggaran 2018 yang lalu membahas 2019 saya kebetulan baru jadi anggota di Komisi XI pada waktu itu. Saya pernah mengangkat isu terkait pengawalan proyek-proyek oleh Kejaksaan waktu itu. Ini sebetulnya gagasan dari BPKP dari pemerintah atau memang gagasan dari Kejaksaan. Waktu itu saya pertanyakan, kalau proyek ini harus dikawal kan rasanya kalau menurut saya kok tidak perlu ya. Seolah-olah kok BPKP sebagai unsur pengawas intern ini kok tidak yakin dengan kinerja dirinya, dalam hal ini pemerintahlah, kenapa mesti dikawal. Dan terbukti kemarin kita mengikuti pemberitaan terjadi juga malah penyimpangan ya kalau ngga salah di PU di Jogja itu. Itu yang muncul yang ngga muncul saya ngga tahu. Apakah ini juga tidak ada implikasi highcost. Apakah ini memang keinginan dari sarannya BPKP atau bagaimana. Menurut saya kalau saran dari BPKP program ini apakah ada anggaran khusus untuk Kejaksaan. Karena rasanya tidak mungkin Kejaksaan menganggarkan, pengawalan pasti disediakan oleh BPKP atau kementerian, aneh menurut saya. Nah kedepan ini dikaji ulanglah, ngga ada jaminan itu dikawal itu terus bersih. Dari saya itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan yang sebelah kanan, Pak Hatari.

F-NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pak.

LKPP juga baru diadakan tahun 2015 ya. Dari BPKP, bapak sudah pernah sampai di Sofifi, sudah pernah sampai di Sofifi, belum sampai. Sofifi saja Bapak belum sampai bagaimana berencana membangun kantor disana, nanti Bapak kesana pakai apa. Itu harus perlu dilakukan studi kelayakan Pak. Itu pernah pusat pemerintahan itu kan diharapkan mendekatkan pelayanannya kepada rakyat, tapi kotanya sendiri pusat pemerintahannya di pulau yang, sudah pokoknya kalau Bapak belum sampai Sofifi ya studi baik-baik dulu baru bangun kantor disana, itu saja Pak karena saya dari sana jadi. Jadi rencanakan yang matang kalau tidak nanti. Kantor-kantor seperti Brimob saja sudah kosong

semua disana Pak. Itu Bapak misalnya bekerja satu minggu hanya bekerja dua hari saja, sisanya ngga bisa kesana lagi, apalagi kalau laut tidak bersahabat Bapak akan di rumah terus selamanya. Dari Bappenas Pak, terkait dengan aset yang nanti ditinggalkan di ibukota yang lama. Kerjasama pemanfaatan sampai lima puluh tahun, kerjasama penyediaan infrastruktur juga sampai lima puluh tahun. Pak ini kan baru nanti akan dibuat PP atau sudah ada ketentuan yang mengatur tentang lamanya kerjasama ini Pak. Kalau sewa dengan jangka waktu lima tahun ya, kan masih ada satu lagi yang dimungkinkan Pak, Bapak dari Bappenas tukar guling, masih ada satu lagi tukar guling Pak, itu ketentuannya sudah ada. Kemudian dari kalau skema satu maupun dua yang 19,2 persen itu atas beban APBN, dan oleh Pak Menteri itu pasti multiyear. Multiyears ini kira-kira berapa tahun Bapak estimasi, multiyears yang dibeban atas biaya APBN ini multiyearsnya berapa tahun, itu saja Pak. Karena multiyears itu diperlukan kontrak induk. Yang namanya multiyears adalah pembayaran lebih dari satu tahun, bisa lima tahun, bisa sepuluh tahun, itu saja Pak.

Terima kasih.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Pimpinan, mohon ijin Pimpinan, melalui Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu Indah.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Saya meminta pelaksana tugas Kepala BPKP yang menandatangani jawaban ini Bapak Iswan Helmi untuk mencabut jawaban Anda ini Pak, ini tertulis Pak. Karena ini kan diedarkan ke kami semua sebagai lampiran. Dan kemudian kalau semua membaca di halaman lima ini Indah Kurnia dari Fraksi PDI Perjuangan mengajukan pertanyaan yang tidak terkait dengan BPKP, bagaimana orang menilai saya. Lah kalau Bapak itu tugasnya sebagai badan pengawasan keuangan dan pembangunan mengelola pertanyaan Anggota yang hanya sedikit ini dari 55 Anggota terus Bapak tidak ngerti dan tidak tahu jawabnya seperti apa. Saya meragukan loh Pak kalau kita juga menyetujui anggaran BPKP ini.

Terima kasih Pimpinan.

Saya minta invalid dan diganti yang benar.

KETUA RAPAT:

Cukup ya ada empat apa tiga pertanyaan tadi dari Pak Harry, ya ngga nanti bisa langsung dijawab Pak Harry kemudian Pak Refrizal kemudian Pak Hatari, kemudian tadi ada permintaan dari Bu Indah, karena memang dibelakang itu pertanyaan pernyataan yang disampaikan tidak terkait dengan

BPKP ya mungkin maksudnya itu pertanyaan bukan ke BPKP, tapi tolong dijawab sendiri.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Ya banyak Pak satu ruangan ini kan banyak yang tanya.

KETUA RAPAT:

Tolong dijawab sendiri ya. Kami silakan dari BPN dulu.

SEKRETARIS UTAMA MENTERI BPN/KEPALA BAPPENAS:

Terima kasih Pak.

Saya mencoba untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Harry Poernomo Anggota Dewan yang terhormat. Pada prinsipnya saya sependapat sekali bahwa dalam kalau kita melihat program utama yang disampaikan oleh kami di Bappenas selain dengan program utama terkait perencanaan penganggaran model inovasi yang selama ini kami lakukan ada penggunaan kesenjangan wilayah dan sekarang ditambah tentang koordinasi pemindahan ibukota negara. Ada satu hal yang sangat terkait tadi disampaikan Bapak yaitu pengembangan management telenta sumberdaya manusia Indonesia Pak. Jadi kita melihat konteks dari talenta management talenta secara keseluruhan, bagaimana kaitan sumberdaya manusia yang ada sekarang ini. Dan selama ini telah tadi Bapak juga sebutkan banyak sekali sudah menerima anggaran cukup besar dari pendidikan dan lain sebagainya, bahkan kalau saya lihat di catatan ada 620 Universitas, 993 Akademik, 296 Politeknik, 2500 Sekolah Tinggi, 233 Institut, BLK yang juga jumlahnya cukup besar, SMK yang juga cukup besar ada 14.000 dan lain sebagainya dan sebagainya. Namun ada hal isu yang cukup penting terkait dengan kaitan SDM ini yaitu bagaimana pemenuhan terhadap kebutuhan dari sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja yang ada Pak.

Jadi misalnya kalau kami lihat disini intinya ada semacam gap yang kami di Bappenas mengamati dari tenaga kerja yang dihasilkan dari berbagai perguruan tinggi dari sisi suplai tersebut pertama adalah produktivitas yang masih rendah, ini kita kaji kita lihat kita bandingkan dengan negara tetangga dan juga dilihat dari berbagai indikator. Kemudian juga terkait dengan masih lambatnya ...(suara tidak jelas) kami lihat, terutama ada rendahnya inovasi Pak. Nah atas dasar itu kita coba untuk bagaimana menganalisa ini semua Pak, karena apa yang diminta di sisi demandnya ini dengan apa yang diminta di sektor penghasil ini banyak sekali yang ada gap, nah ini yang kita sebut dengan *critical oucup transilist*, ini yang sekarang Bappenas sangat menghadapi isu ini Pak. Dan ternyata tidak dalam hal tenaga kerja saja Pak tapi juga dalam kaitan Apartur Sipil Negara PNS terlihat dari sisi belum distribusi dan lain sebagainya, misalnya kami contoh yang kita lihat selalu kita bicarakan Kalimantan Pak. Dari PDB yang paling banyak sumbangannya misalnya dari Migas, Mineral tetapi ASN yang bekerja yang berlatar belakang dari pendidikan yang terkait catatan kami ini dibawah satu persen. Nah ini hal-hal yang sekarang kita

mau benahi Pak. Jadi benar bahwa kami memang melihat dari secara luas management talenta ini. Jadi intinya begini Pak, dari sumberdaya manusia yang ada ini kita bisa menjadi modal manusia, dari *human resource* yang selama ini kita punya menjadi *human capital*. Nah ini yang susah sebenarnya karena kita harus menunjukkan dengan angka, menunjukkan dengan *link and mach* dan berdampak kepada pendidikan-pendidikan lembaga yang ada, karena akan nanti penyesuaian mata ajaran, kurikulum dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh apa pasar. Nah ini juga menjadi konsen makanya dari Bapak Presiden yang sering kita dengar bahwa kita memiliki dana yang cukup besar yang dikelola oleh LPDP dana pendidikan ini supaya diarahkan juga bagaimana mengembangkan dari bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang diminta seperti vokasi, pelatihan terus kemudian pengembangan dari apa namanya pendidikan yang S.2, S.3, tapi kalau tidak kelihatan dimana kebutuhannya ini juga penyalurannya juga akan menjadi masalah. Itu secara singkat demikian Pak Harry yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih Pak Ketua.

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Pimpinan mohon ijin komentar sedikit ya.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Apakah materi yang dikemukakan tadi juga itu di share ke kementerian teknis terkait atau tidak. Apa sebetulnya yang menjadi pemikiran Bappenas ya catatan-catatan dari Bappenas yang tadi disampaikan itu apakah kementerian lain juga mendapatkan penjelasan yang sama Menteri Reformasi Birokrasi terhadap talenta ASN itu. Saya usul Pimpinan sesekali ada baiknya mungkin perlu kita mengundang Bappenas untuk memaparkan secara spesifik ya bicara masalah rencana pembangunan sumberdaya manusia ini, atau sesekali Bappenas mengadakan event apa semacam FGD dengan kami ya, karena intinya begini saya tidak ingin kita menghamburkan uang yang jumlahnya besar tapi hasilnya sama sekali tidak ada ya outcomenya tidak optimal. Kita sulit duit ya, anggaran kita sangat terbatas tapi kita membuang-buang dengan percuma biaya yang mahal itu untuk pendidikan. Hasilnya dua puluh tahun ini hampir tidak ada. Cobalah nanti siapkan paparan yang lebih konperhensif, rinci ya nanti kita dishare untuk itu. Kalau kesempatan sekarang ini kan mungkin waktunya tidak memadai. Kemudian juga itu dipastikan dibahas ditingkat kabinet dan kementerian dipastikan mengikuti apa yang menjadi pemikiran Bappenas, karena sebagai pusat pemikir kan Bappenas ini.

Kemudian tadi disinggung juga mengenai rendahnya atau minimnya inovasi. Kita belum lama meluncurkan undang-undang apa Sisnasbitek ya, akan dibentuk BRN (Badan Riset Nasional). Ini juga Bappenas harus ewer ya supaya di pengalaman yang lalu minimnya inovasi ini jangan terulang lagi.

Dengan biaya yang sangat terbatas ini ya kita harus mendapatkan outcome yang lebih optimal lagi, jangan mengulang lagi pengalaman buruk yang lalu. Itu yang saya kehendaki dari Bappenas karena bagaimanapun Bappenas ini kan pusat pemikiran kita pusat kajian secara nasional.

Terima kasih.

SEKRETARIS UTAMA MENTERI BPN/KEPALA BAPPENAS:

Kami catat dan kami ditindaklanjuti Pak.

KETUA RAPAT:

Saya kira usulan Pak Harry baik ya. Tolong disampaikan kepada Pak Menteri mengenai FGD mengenai khususnya mengenai target-target pembangunan, indeks pembangunan manusia kemudian indeks gini ratio, kemiskinan, pengangguran itu ngga masalah kita karena memang datanya selama ini kemarin di BPJS saja sudah ngga jelas, itu sudah jaman dulu loh, sejak jaman tahun dua ribu berapa itu dua ribu sebelas itu, masalah data itu ngga pernah selesai sampai sekarang. Iya data BPS beda sama data ini data ini beda sama data itu, kayanya pemerintah punya data terpadu tapi ngga pernah terpadu gitu, teruuuuuus saja masalah. Lain saya tanya data orang miskin saja masih ada tumpang-tindih itu menurut laporan BPKP sendiri itu yang buat ada dua puluh juta, lima belas juta sudah dicleansing masih ada sepuluh juta lebih yang belum dicleansing. Ya kalau masalah kaya begini terus kemudian kita naikkan, waduh bahaya orang miskin masih miskin ngga mau bayar BPJS tapi ngga masuk PBI. Sementara yang kaya masuk PBI, ya kalau kaya gini kan kacau ini negara kita, semuanya ini kan berproses data. Saya kira nanti kita perlu untuk melakukan FGD dengan Bappenas masalah target-target pembangunan. Saya kira itu usulan yang menarik ya. Ya silakan Bu.

F-PDIP (Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.D.E.):

Iya melanjutkan Pak. Ini melanjutkan Pak Harry tentunya usulannya. Karena kita sudah paham bahwa anggaran harus disusun sesuai dengan pendekatan output, dan Pak Jokowiya juga ngomong bukan hanya output tetapi *impact dan outcome*, begitulah ya. Jadi artinya kita kan ketika menyetujui anggaran kita ini kan harus tahu kira-kira apa target ini dari duit yang kita setuju tersebut. Ini kan karena kita ngga boleh satuan tiga tapi pada saat menyetujui kita harus tahu dong, *impact* dan itunya *outcomenya* apa sehingga kita paham bisa membayangkan menyetujui sekian triliun itu nanti dapat apa rakyatnya. Itu baik untuk anggaran internal maupun untuk anggaran yang akan datang. Jadi kita ngga akan ngurus dieksekusi dimana da ini seterusnya tapi kita nyegat saja di *output outcomenya* itu. Dan saya pikir ini juga akan membantu BPK juga untuk memberikan audit yang lebih konvergen tadi jangan bikin agenda lain yang kemudian divergen itu. Jadi coba mungkin RKA K/L harus juga disertai dengan target itu, bukan dalam bentuk satuan tiga hanya sebagai pegangan kita untuk pengawasan kelak ketika kita rapat lagi kita punya apa *benchmark*, oh ini duitnya jadinya ini dan seterusnya. Mungkin itu Pak saya

kok, kok aneh gitu membahas sesuatu yang abstrak ngga ngerti *output outcame* dari duitnya dan sebagainya.

Oke terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu. Silakan dilanjutkan dari BPKP, tadi ada beberapa eh dari BPK, silakan.

F-PKS (H. REFRIZAL):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh pertanyaan Pak Refrizal silakan dari BPN janji mau jawab, silakan Pak BPN.

F-PKS (H. REFRIZAL):

Pindah ibukota ada apa dengan Ibukota Jakarta, gitu kan tolonglah dijawab, ada apa denganmu kalau nyanyinya Bu Indah gitu kan.

SEKRETARIS UTAMA MENTERI BPN/KEPALA BAPPENAS:

Mohon ijin Pak.
Terima kasih Pak.

Memang sebetulnya dari beberapa kajian kami beban pertama memang tujuan dari pemerintah khususnya Presiden itu ingin mendistribusikan ekonomi, pertama itu Pak. Yang kedua beban DKI sendiri sebetulnya sudah sangat tinggi termasuk juga beban Jawa, termasuk juga beban jumlah penduduk yang begitu tinggi di Pulau Jawa. Jadi DKI itu sekarang Jakarta jumlah penduduknya terbesar. Kemudian yang kota-kota di Jabodetabek lain pun itu termasuk Bekasi, Depok, Tangerang dan Tangerang Selatan itu memang lima kota terpadat di Indonesia. Jadi sekarang total Jabodetabek itu lebih dari 33 juta, sehingga sementara daya dukung Jakarta juga sudah terlalu besar, termasuk menggunakan air tanah. Jakarta ini sekarang setahun kurang-lebih tujuh centimeter turun Pak permukaannya karena penggunaan air tanah, karena penggunaan apa namanya air yang tersistem itu baru enam puluh persen. Memang itu jangka panjang akan tetap terus membangun itu memastikan bagaimana daya dukung Jakarta terkendali. Di sisi lain Jawa yang apa namanya jumlah penduduknya sudah melebihi dari lima puluh delapan persen karena memang karena pusat apa pemerintahan masih di Jakarta. Kemudian keseimbangan pembangunan ekonomipun sama. Jakarta sendiri memang sumbangan ke nasional cukup tinggi Pak, tujuh persen. Sementara Jabodetabek dua puluh persen, tapi share Jawa sendiri itu lebih lima puluh delapan persen. Itu selama mungkin tiga puluh sampai tiga puluh lima tahun

terakhir ini. Sementara pertumbuhan Jawa itu lebih tinggi dari pembangunan di luar Jawa. Nah ini yang ingin dicoba apa namanya salah satu strategi kita untuk mendistribusikan pembangunan ke luar Jawa karena kita ingin memastikan Indonesia Centris terjadi, bukan lagi Jawa Centris. Nah kemudian itulah beberapa yang isu lain adalah masalah transportasi. Sekarang ini apa namanya kemacetan di Jakarta berdasarkan kajian tahun dua ribu tiga belas pun dari UGM sudah menunjukkan kerugian akibat macet 56 triliun dari Jakarta. Kemarin 2017 Bank Dunia juga sudah mengeluarkan tahun 2017 ya sekitar 63 triliun kerugian per tahun akibat kepadatan di Jakarta. Jadi itu beberapa apa namanya pertimbangan kenapa akhirnya diputuskan dari tiga alternatif tadi diputuskan ke luar Jawa ini Pak. Mungkin sekitar itu Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Ref?

F-PKS (H. REFRIZAL):

Kalau ...(suara tidak jelas) pasti ngga cukup. Kan kalau pindah itu kan perlu ada studi yang layak, layak kita meninggalkan Jakarta, layak juga tempat baru kita tempati sebagai ibukota, kan panjang ceritanya Pak. Yang kita pindahkan hanya bukan kantornya Pak Jokowi kan Pak, semua pertahanan kan harus kita pindahkan kesana. Semua perangkat-perangkat pegawai Bapak ini termasuk pindah nanti kesana, bukan hanya pindah kantor selesai urusan kita. Kalau cerita Bapak tadi itu enteng sekali itu kaya coba-coba gitu. Panjang ini perdebatannya Pak kalau sudah, ini tiga hari tiga malam kita berdebat ngga selesai ini Pak. Saya kemarin berdialog sama teman saya dari Golkar, Bapak setuju pindah ibukota, nda. Kalau ngga setuju apa yang senang. Aceh, murahan mana ini pakai Helikopter daripada pindah ibukota, katanya kata teman saya ini Pak, padahal dialog ringan kita ini, sebelahan Pak, gitu. Nah kan panjang ini ceritanya ini Pak. Jadi kalau kita berdebat ini makanya di undang-undangnya juga belum ada itu ya untuk kita berdebat ya, studi kelayakannya belum ada itu, bagaimana kita mau berdebat, tapi tiba-tiba mau pindah saja itu, kan lucu juga negara main-main begitu. Jangan main-main kita pindah ibukota, lucu-lucuan ini Pak, coba-coba kan mereka. Kalau pindah pembangunan pindahkan saja pembangunan kesana, kenapa kita harus pindah ibukota, begitu loh Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Begitu Pak Ref, saya kira kalau bicara pindah ibukota ini bisa sampai besok pagi kita selesaikan, ya karena polemiknya masih banyak. Karena tolonglah disiapkan undang-undangnya dulu dibawa ke DPR baru dibahas kajiannya seperti apa. Kalau undang-undangnya saja belum ada ya kan Ibukota DKI Jakarta masih DKI masih ibukota sekarang. Undang-undangnya juga

belum dicabut jadi kita ngga usah terlalu dalam dulu.

F-PKS (H. REFRIZAL):

Kita tua Pak, satu Kalimantan lebih Jakarta, ...(suara tidak jelas) undang-undangnya belum ada bagaimana. Satu keputusan Pak Jokowi pindah kesana, satu undang-undang tinggian mana kira-kira itu ya.

KETUA RAPAT:

Jadi Saya kira itulah Pak Ref ya. Nanti seandainya misalnya di DPR putus, pindah. Nah kajian-kajiannyapun akan dibahas dengan Komisi XI, karena Bappenas kan minta kerja kita. Saya kira masih panjang urusannya Pak Ref. Jadi dari BPK tadi ngga ada pertanyaan yah, usulan ya silakan.

SEKJEN BPK:

Terima kasih Pimpinan dan Ibu Bapak Anggota Komisi XI.

Kami terima kasih usulan Bu Eva tadi untuk mengkonfergenkan atau menyelaraskan juga rencana pemeriksaan BPK dengan prioritas pembangunan pemerintah. Dan kebetulan memang sekarang ini diputuskan oleh Pimpinan BPK rencana strategis BPK ini berbarengan dengan RPJMN, jadi rencana kurang-lebih 2020-2024, yang tahun lalu kita setahun lebih mundur. Dan kami akan menjadikan prioritas pemerintah itu menjadi tema pemeriksaan BPK yang kita prioritaskan. Jadi karena anggaran kami juga terbatas maka kami harus memilih mana yang akan menjadi obyek atau tema-tema pemeriksaan. Dan itu akan menggunakan apa yang akan disusun oleh pemerintah prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah itu apa. Dan ini akan kami terus lakukan setiap tahun untuk penyusunan rencana pemeriksaan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya saya kira yang diusulkan Bu Eva tadi menarik, kan disini ada BPN, Kementerian BPN ada BPK ya kan. Kan ada rencana ya kan kemudian target dampak outcamenya begitu jadi disitu dilihat keberhasilannya. Ini keberhasilan pas kan kalau dilihat dari situ, pemeriksaannyapun bisa mengarah kesana, saya kira itu.

Silakan Pak Heri.

F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan kawan-kawan Komisi XI yang saya hormati,
Bapak Ibu mitra Komisi XI.**

Ini menyangkut pembicaraan dari Bu Indah tadi yang dari BPKP saya coba minta bahan yang kemarin yang kita coba bahas. Ternyata cerita ini tidak jauh berbeda. Saya cerita tentang kinerja implementasi Siskudes, begitu ya Pak. Waktu itu saya bertanya tentang masalah dana desa. Siskudes ini sudah versi kedua, tapi itu sempat kalau tidak salah saya pertanyakan desa itu kan sudah lama ada sebelum republik ini ada. Maksudnya dana desa itu untuk redistribusi negara kepada desa. Didalamnya itu ada beberapa aturan-aturan tentang yang saling tumpang-tindih waktu itu saya bicara. Ternyata saya masih punya catatannya tapi dikatakan pertanyaan yang disampaikan tidak terkait dengan BPKP. Ini tentang kinerja implementasi Siskudes versi kedua, dimana didalam itu ada enam PP, ada sembilan Peraturan Menteri Desa, ada dua Peraturan Menteri Keuangan, ada enam belas Peraturan Menteri Dalam Negeri, ada dua Peraturan LKPP, ada SKB empat menteri, belum lagi Peraturan Bupati, belum lagi Peraturan Daerah. Disamping institusi aparat yang mengawasi termasuk Polri dan Kejaksaan, belum lagi LSM-LSM yang menekan kepala desa kita, itu terjadi di lapangan. Yang waktu itu mungkin saya sempat pertanyakan bagaimana sih kinerja implementasi sesungguhnya, karena tidak semua kepala desa ini sama, ada yang mereka tidak paham begitu ya, tapi itu mungkin itu yang saya tanyakan. Kalau terkait masalah temuan Bapak dan Ibu mohon maaf kami ini sudah tiga hari Fit Proper calon Anggota BPK, seperti disampaikan Pak Arif disini. Ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. Itu di HPS semester dua 2018 betul Pak Hari, itu jumlahnya lima ribu lebih, tapi 2017 jumlahnya ada empat ribu kerugiannya Cuma dua belas koma sekian sekarang naik menjadi enam belas koma sekian triliun, seharusnya kan di satu sisi pemeriksaan. BPKP ini pengawasan, seharusnya di awal dong diawasi seperti apa kok kenapa bisa sampai tidak bisa ditindaklanjuti, begitu loh. Saya pikir itu pertanyaan yang nyambung Pimpinan, bukan disampaikan tidak terkait dengan BPKP, kok agak bingung saya begitu loh.

Dari tadi saya diam saja, biarkan dulu Bu Indah yang marah begitu loh. Kalau mau dibuka rekamannya ada kok. Saya tidak ingin bertanya panjang-panjang, saya ingin tahu seperti apa sih begitu loh. Malah kalau mau jujur saya apresiasi disini terkait dengan masalah anggarannya. Kalau mau jujur saya malah lebih susah dengan LKPP, kok dipotong tiga puluh persen, eh dua puluh persen begitu loh. Yang lain naik semua kok, malah BPKP naik tiga puluh persen, BPS paling besar lima puluh dua persen, kita apresiasi kok ngga ada masalah buat anggaran, Cuma kita pingin tahu begitu loh Pak. Bagaimana ini kira-kira outcomenya seperti apa sih, karena kan kita pingin tahu Bapak bicara program unggulan, Bapak bicara program prioritas, seperti apa sih program unggulan itu, apakah sudah terukur, apakah sudah terdefiniskan. Malah kemarin waktu itu sempat ada Pak Bambang disini saya sampaikan, adakah alat ukur dari Bappenas atau mungkin Kementerian Keuangan atau mungkin lembaga lain dengan anggaran seperti ini pencapaiannya seperti apa begitu loh. Ada ngga sih alat ukurnya begitu loh, khususnya ke Bappenas waktu itu saya tanyakan. Bahkan sempat di luar ini saya bicara dengan Pak Bambang, bos tolong berikan kami Komisi XI draft rencana pemindahan ibukota, karena

ini ramai, kami ini kan mitra Bappenas, supaya suara kita sama, begitu loh. Bahkan sempat saya cowe kalau ngga, ini coba adain deh FGD biar kita ngomrol bareng kaya bagaimana sih, supaya sudut pandang kita sama, begitu loh. Saya sempat bicarakan seperti itu, ini lembaga politik nanti diplintir-plintir bahkan ada yang sudah memplintir, oh Kalimantan Timur tempat lahannya Pak Prabowo, lahannya Pak HJ, jadi capai melebar semua. Sempat saya sampaikan ke Pak Bambang, bahkan saya minta ke Pak Bambang disini waktu itu, tolong beri kami bahannya. Dijanjikan iya, sampai hari ini ngga ada. Kita ingin suport mitra kita, kita tidak ingin kita lepas tangan dengan mitra kita. Anggaran disini kecil semua, terlalu kecil. Kalau kita berbicara Pak Arif disini walaupun BPK naik kurang-lebih 19-20 persen, itu 0,13 persen dari APBN kita. Dua ribu lebih Bapak Cuma punya duit 3,5 triliun untuk mengaudit, ah yang benar saja Pak, berapa puluh ribu entitas disana, ngga mungkin, begitu loh Pak. Dan waktu itu saya tanyakan ke BPKP bagaimana sih pengawasan, satu pengawas satu pemeriksa. Kok bisa ada temuan yang tidak bisa ditindaklanjuti, dan angkanya semakin naik bukan semakin turun, begitu loh.

Yang kedua tentang Siskudes karena aturan mainnya kan tumpang-tindih, apalagi SKB empat menteri harus proyek padat karya, pencairannyapun belum tentu Januari, kan repot kalau pencairannya belum tentu Januari. Ujung-ujungnya anggaran tidak tergunakan, ngga butuh SK, kepala desa sekarang sudah redam. Kalau kemarin 2019 mendekati Pemilu ramai Pak di daerah itu. Itu loh yang kami tanyakan kemarin kepada BPKP, saya pikir nyambung pertanyaannya gitu loh, Cuma kok disini dibilang tidak terkait dengan BPKP, kok saya bingung begitu loh. Ya sudah saya diam saja dulu begitu loh. Kami ingin mendukung mitra kami, karena anggaran yang diajukan semuanya kecil, bahkan Kementerian Keuangan pun yang mengajukan sampai 45 triliun kita akan setuju Pak, memang itu hak mereka untuk berbelanja, Cuma kami ingin bertanya cari duit ini sulit Bapak Ibu sampai pajak itu diinjak-injak, kami hanya ingin tahu evaluasi outcamentanya seperti apa, sudah sesuaikah gitu loh, Cuma itu yang ingin kami tanyakan. Mungkin demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan BPK dulu habis itu BPKP, kami silakan.

SEKJEN BPK:

Terima kasih tadi apa yang disampaikan oleh Pak Heri Gunawan. Jadi kami sudah menyampaikan tadi beberapa hal penyebab apa namanya tidak dapat ditindaklanjuti prosentasenya dan kemudian ya kondisi kahar kemudian subyeknya masuk proses pengadilan dan organisasinya berubah. Dan memang ini perlu terus kami amati kedepan apakah memang kondisi-kondisi tadi semakin berkembang atau tidak. Demikian barangkali Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Lanjut dari BPKP.

SEKRETARIS UTAMA BPKP:

Terima kasih Pak.

Pertama kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Pak tadi atas kekurangtepatan penulisan kami khususnya ke Bu Indah dan Pak Heri Gunawan. Ada beberapa hal yang memang mungkin terlalu sempit kami mengartikannya, sehingga sebetulnya apa Bapak yang dikomentari oleh Bu Indah Kurnia dan Pak Heri sebetulnya bisa ada kaitan dengan BPKP Pak. Ijin nanti sesuai arahan tadi Bu Indah kami akan tarik surat dan menerbitkan surat baru barangkali Pak. Ijin kalau diijinkan

KETUA RAPAT:

Bukan, bukan surat, jawaban.

SEKRETARIS UTAMA BPKP:

Oh ya jawaban.

KETUA RAPAT:

Jawaban tertulis.

SEKRETARIS UTAMA BPKP:

Jawaban tertulis dengan surat

KETUA RAPAT:

Ya sudah, sudah kita tarik jawaban tertulisnya, nah nanti ya disesuaikan lagi ya.

SEKRETARIS UTAMA BPKP:

Siap Pak, ya terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Ya.

SEKRETARIS UTAMA BPKP:

Kemudian untuk Pak Harry Poernomo, ijin Pak Harry menyampaikan

bahwa TP4 itu memang program kerjanya di Kejaksaan Agung Pak. Kami tidak terlibat juga disitu dan kami tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan TP4, termasuk di daerah TP4D. Jadi murni dari program dari Kejaksaan Agung.

Kemudian Pak Hatari ijin Pak di Sofifi kami akan memang kajian studi kelayakannya belum tuntas Pak. Kami hanya ingin memindahkan tapi di Ternate sendiri memang lahannya sudah sangat terbatas, kami ingin punya gedung yang layak disperit sehingga berpikir Sofifi sudah dikasih hibah oleh provinsi kita ikut disana gitu Pak, ijin terima kasih atas masukannya Bapak. Kemudian saya kira itu mungkin Pak.

Ijin Pak, terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Mau tanya itu sistem ...(suara tidak jelas) dua nol itu sudah teraplikasi dengan baik di desa?

SEKRETARIS UTAMA BPKP:

Sekarang ijin menyampaikan Pak untuk dua kosong dua ini sesuai surat dari Kementerian Dalam Negeri tadi ada dukungan dari Kementerian Dalam Negeri Pak Heri juga. Jumlah desa dari jumlah desa 74.954 ini sudah dibimtek sampai saat ini sudah 98 persen dibimtek tapi implementasinya sendiri sudah 91 persen Pak untuk yang versi baru. Kalau yang versi lama sudah 95 persen lebih diimplementasikannya.

KETUA RAPAT:

Versi baru tentunya yang dipakai kan, yang sembilan persennya kapan?. Harus diaplikasi semua ya di desa itu.

SEKRETARIS UTAMA BPKP:

Ya sebetulnya ini sudah harus segera Pak, tapi keterbatasan sumberdaya kami juga ketika mengerahkan agak, ini sudah 91 persen sekarang ini, 68 ribu desa yang sudah implementasi versi dua.

F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Pimpinan mohon maaf interaksi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Pak Heri.

F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Saya ingat persis waktu itu Pak Hatari bertanya tentang dana desa yang pakai Siskudes di daerahnya ini daerah merupakan daerah kepulauan yang

ngga ada internet. Tadi saya ceritakan ada peraturan yang tumpang-tindih disini. Mari kita lihat Bapak disitu ada enam belas Peraturan Menteri Dalam Negeri. Setahu saya desa itu adanya di Menteri Desa, begitu loh, kok Permendagri gitu loh. Belum lagi SKB empat menteri saling tumpang-tindih, bagaimana cara ngimput di Siskudusnya begitu loh. Ini peraturan berubah lagi ini, sebentar lagi 20 Oktober menteri berubah lagi, dana desa masih tetap ada, apakah sistem ini harus berubah nanti jadi Siskudes delapan. Sementara ini kepala desa kita tidak semuanya sama, begitu loh Pak. Yang ingin saya tanyakan bagaimana ini implementasi Siskudes terkait dengan peraturan yang saling tumpang-tindih ini Bapak dan Ibu. Kalau dia Cuma ngimput *doang* bisa mungkin, Cuma kan dia ngga paham dipakai apa, nanti dikit-dikit lagi kepala desa kita jadi tersangka lagi, padahal niat awalnya kan baik begitu loh. Nah ini yang ingin saya tanyakan ke pengawas, begitu loh Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau di lapangan sebenarnya kita kasihan juga sama mitra kita BPKP ini. Kadang-kadang sistem yang satu belum selesai muncul lagi aturan baru dari Kemendagri, dari Kemendes, bikin lagi perubahan lagi yang satu belum dicerna yang satu muncul baru lagi. Kadang-kadang mohon maaf yang kaya gini-gini ini yang bikin rakyat susah, kepala desa pusing akhirnya sudahlah dibagi bareng sajalah gitu. Karena apa belok kiri dimakan macan belok kanan dimakan buaya lurus dimakan ular, begitu loh bingung gitu loh akhirnya. Iya akhirnya ini penyidiknya Kejaksanaan sama Polri ya ngga tahu mana yang dipakai gitu, pakai yang ini salah, pakai yang ini salah, apalagi kepala desa. Jadi tolong ini, ini perhatian kasihan yang membuat sistem ini kan BPKP. Nah kalau BPKP satu belum selesai kemudian tambah lagi muncul baru lagi tambah lagi saya kira ini akan jadi masalah. *Mbok* sesuatu aturan itu agak jangka panjang dikit gitu loh, tiga tahun kek dua tahun setengah sehingga pergantiannya itu ya kan agak-agak lama gitu jadi bisa dicerna dulu oleh kepala desa Siskedes ini baru kemudian ada perubahan aturan itu enak.

Jadi didiamkan dulu aturannya gitu loh. Semua di apa namanya Kemendagri kemudian yang terkaitlah itu kita dudukkan dulu disimpan dulu yang ini sudah dicerna baru itu dibuat sistem baru, perubahan sistem baru atau revisi sistem baru. Jadi saya kira, tolong BPKP juga jangan mau-mau saja, kasihan Pak. Kasihan dari BPKP-nya kasihan juga kepala desanya. Ya tolong ini ini penting sekali untuk dicerna. Saya tahu persis bahwa kemarin waktu sosialisasi Siskudes kan saya juga hadir ya kan disitulah ada lubang-lubangnya itu cukup menganga, dan saya kesulitan dari BPKP Pak kami juga bingung ini Pak, ini belum selesai datang lagi aturan baru lagi masuk lagi kami suruh rubah lagi ya nda mungkin kalau kaya begini Pak. Bapak mungkin bisa tapi kepala desanya yang ngga bisa. Ya tolong ini dicerna jangan mau begitu saja, jadi kita biar aturannya itu agak sedikit panjang gitu loh sehingga BPKP mau merubah juga ada waktu gitu. Ya saya kira itu, saya kira sama Pak Heri pertanyaan saya juga karena memang itu ada di terjadi di lapangan ya.

F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Betul, Cuma Pimpinan mohon maaf, jawaban darinya pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan tidak terkait dengan BPKP, begitu loh Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sudah minta maaf dan ditarik, sudah ditarik.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Ngga, mungkin, ijin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Pak, Bunda.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Mungkin Pak Iswan ini pelajaran, bahwa untuk menandatangani apapun Bapak baca Pak, karena yang sampai ke kami itu yang kita tahu adalah yang menandatangani Pak. Ini ada dua kemungkinan, Bapak memang setuju dengan pernyataan itu atau Bapak ngga mengetahui yang ditandatangani Bapak apa. Lah kalau Plt-nya seperti ini, kan kita ngeri ini BPKP ini fungsinya sangat strategis, terus tanda-tangan itu jawaban Anggota saja yang Cuma berapa gelintir yang bertanya. Kami ini kolektif kolegial Pak tidak semuanya ada di ruangan rapat ini kan, makanya yang hadir tolong dihormati apalagi yang bertanya. Jadi kalau disampaikan seperti itu bukan menyangkut Indah Kurnia disitu ada sebutan Fraksi PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan membaca itu dia malu punya saya itu, kok Indah Kurnia bisa mengajukan pertanyaan yang nda ada korelasi sama sekali ngga relevan dengan mitra, itu kan seolah-olah seperti itu apalagi Pak Heri mengajukan waktu itu saya ingat saya ngga, ngga ngutip BPKP sama sekali saya hanya ingin tanya Pak Kecu dan Pak Rony waktu itu, dan jawabannya sudah ada.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya kira cukup ya tadi sudah ditarik kemudian tolong di apa diberikan jawaban yang terbaru jawaban tertulis yang terbaru, cukup ya.

F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Pimpinan mungkin satu jam kedepan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Pada saat nanti kita mangambil keputusan terkait masalah anggaran mungkin kami dari Fraksi Gerindra ingin membuat sebuah catatan dibawahnya, khususnya terkait dengan anggaran LKPP. LKPP kalau tadi saya lihat anggarannya ini kan dia turun 20,3 persen, sementara di satu sisi baru-baru ini kan ramai, menteri ganti 101 mobil, Jokowi beli dua Mobil Mercy, itu kan semua lewat kajian dari LKPP. Tapi sementara LKPP sendiri untuk penggandaan ataupun sesuai dengan Tupoksinya dia kalau kita berbicara disini lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa khususnya pemerintah kok anggarannya hanya seratus enam puluh sekian, begitu loh. Saya meminta ini menjadi sebuah catatan terkait dengan masalah anggaran LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, saya pikir itu mungkin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya bacakan dulu nanti baru kita berikan catatan ya.

F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Saya bacakan dulu rancangan keputusan kesimpulan.

1. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas dalam RAPBN tahun 2020 sebesar Rp.1.828.689.846.000,- dengan rincian: Satu, perencanaan pembangunan nasional 948 miliar ya kesana, kemudian dukungan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 870 miliar, kemudian pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur 10 miliar. Setuju, setuju ya, Pak setuju Pak. Jangan-jangan ngga setuju kita setuju Bapak ngga setuju, setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)

2. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Sekretariat Jenderal BPK RI dalam RAPBN tahun 2020 sebesar Rp.3.537.736.904.000,- dengan rincian dukungan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPK 657 miliar lebih, kemudian program pemeriksaan keuangan negara Rp.2.880.000.000.000,- totalnya 3.537.736.904.000,-. Sekretariat Jenderal BPK mengusulkan tambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp.860 miliar yang akan digunakan untuk peningkatan jumlah dan kualitas LH BPK, peningkatan kapasitas ...(suara tidak jelas) Badan Diklat sebesar sekian ada semua di layar, ya peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang pemeriksaan. D. Peningkatan kapasitas teknologi informasi. E. Peningkatan tatakelola organisasi yang profesional. Yang pertama kita setuju adalah pagu anggarannya setuju ya, sebesar tiga triliun, tiga triliun lima ratus tiga puluh tujuh

miliar setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)

Nah kemudian yang tambahannya?

F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Kita pikir mungkin dibuat catatan disitu Pimpinan terkait tambahan. Kita mungkin bisa buka lebih dalam lagi nantinya. Kita harus kaji kembali Pimpinan. Contoh kasus seperti peningkatan kapasitas teknologi informasi. Ya kita juga perlu tahu karena beberapa calon BPK kemarin juga telah mengajukan ngomong-ngomong sama gitu loh.

KETUA RAPAT:

Jadi saya kira inipun belum disetujui sama Banggar. Nanti kan balik lagi ke kita, ya kita minta lebih detail untuk apa namanya yang diminta tambahannya. Jadi kita setuju dulu tambahannya supaya ini kita, supaya dibahas dulu di Banggar. Dari Banggar nanti masuk lagi ke Komisi XI, ya.

F-NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Ijin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Saya kebetulan di Banggar ya, ditanya dulu sama Sekjen BPK tentang penambahan ini dipergunakan untuk apa, karena satu hal yang stagnag adalah begitu banyak rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti. Jadi pada waktu kita bahas RKA K/L itu permintaan penambahan itu untuk bagaimana memperlancar mandegnya rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti yang jumlahnya ribuan sekian. Apakah perincian ini sudah termasuk itu mau tanya mereka.

KETUA RAPAT:

Silakan.

SEKJEN BPK:

Terima kasih Pimpinan dan terima kasih Pak Heri dan Pak Hatari.

Jadi diantara usulan kami untuk peningkatan kapasitas teknologi informasi itu diantaranya adalah untuk pengembangan sistem informasi

pemantauan tindak-lanjut, yang tidak saja di entitas di inspektorat tapi juga di Satker-Satker yang harus menindaklanjuti, sehingga diharapkan ini mempercepat pelaksanaan tindak-lanjut tanpa harus ketemu BPK tanpa harus bawa dokumen bisa discane dan sebagainya. Oleh karena itu diantara itu kami mengusulkan untuk membangun itu semua.

Demikian barangkali Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Apa bisa disetujui?

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ayo silakan Pak Harry.

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Ya, terima kasih.

Tadi disinggung dan juga pada waktu kami mengikuti Fit and Propertest, mengenai peningkatan program audit kinerja itu kan perlu ditingkatkan itu masuk dimana, apa sudah masuk di A itu, sudah, ya pasti ya.

Oke terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi, bukanlah kita sudah setuju bunyinya adalah Komisi XI DPR RI akan memperjuangkan kepada Badan Anggaran usulan tambahan anggaran tahun 2020 Sekretariat Jenderal BPK RI sebesar Rp.860 miliar, ya.

F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Mungkin dilakukan pendalaman dulu baru kita perjuangkan, kan ini belum ada pendalamannya. Kita berbicara hari ini untuk RKKL bukan termasuk tambahannya, hanya RKKL-nya saja mungkin Pimpinan, yang tiga koma lima

oke kita setuju, tapi terkait tambahannya kita harus lihat dulu dong paparan berikutnya seperti apa untuk kita perjuangkan ...(suara tidak jelas) dengan Banggar begitu loh Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ini kita harus segera bikin surat kepada Banggar untuk dibahas. Tidak hanya pagunya tapi juga permintaan tambahannya. Maksud saya biar saja ini surat ini meluncur ke Banggar kita berikan catatan khusus kepada BPK untuk menyampaikan ini nanti, masih bisa ada waktu. Sebelum kita putus nanti, setelah kita berjalan ke luar negeri, gitu loh maksud saya ya, karena ini harus diserahkan ke Banggar kalau ngga, ngga akan dibahas sama Banggar sudah hilang itu kesempatannya gitu. Jadi saya kira kita jadi ya bahasanya adalah Komisi XI DPR RI dapat menyetujui, gitu sajalah dapat menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2020

F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Sebelum perdalam Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Apa?

F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Terkait masalah usulan ini belum kita perdalam, mungkin kita melakukan pendalaman dulu. Untuk selanjutnya silakan diproses tapi kita tetap, kita belum melakukan pendalaman. Yang kita berbicara hanya tiga koma lima Pimpinan di awal itu.

KETUA RAPAT:

Iya begini loh Pak Heri, jadi kita harus bikin surat kepada Banggar isinya mengenai pagunya yang tiga koma lima itu dan juga tambahannya. Jadi kita disini tambahannya ini kita setuju apa tidak, kalau tidak ya sudah ini hilang. Kalau kita setuju yang kita luncurkan ke Banggar untuk dibahas di Banggar walaupun belum tentu juga disetujui oleh Banggar, begitu. Jadi saya kira sambil meluncur ke Banggar ini nanti kita minta pendalaman. Maksud saya kalau memang ini ngga setuju ya sudah, kita ngga tulis disini, ngga kita kasih ke Banggar gitu.

F-PKS (H. REFRIZAL):

Ngga apa-apa, Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PKS (H. REFRIZAL):

Kalau menurut saya kan ini diproses lagi di Banggar ya, ngga apa-apa kita usulkan tambahan ini ke Banggar, nanti kan keputusannya kesini lagi.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PKS (H. REFRIZAL):

Ya terima kasih.

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bukan, yang mengusulkan pemerintah kita ini, bagaiman bagaimana bagaimana?

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Berbicara mengenai tambahan ini, pada waktu kita di konsinyir kemarin apa belum dibahas ini. Kalau belum ya sebaiknya melalui pendalaman lagi. Saya pikir

KETUA RAPAT:

Ini sudah dibahas kemarin waktu konsinyering.

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Oh kemarin sudah.

KETUA RAPAT:

Sudah, semua.

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Termasuk tambahannyapun kita bahas. Nah sekarang ini adalah masalah persetujuan. Kalau kita setuju tambahannya kita luncurkan, kalau kita ngga setuju ya kita ngga luncurkan. Jadi kita ini hanya setuju apa tidak setuju, kalau setuju berarti Komisi XI DPR RI menyetujui tambahan anggaran tahun

2020 usulan, ini baru usulan, iya usulan tambahan, gitu loh. Kalau ngga setuju ya ngga usah kita luncurkan, ya begitu ya. Iya benar kita Komisi XI DPR RI dapat menyetujui usulan, ya usulan tambahan anggaran tahun 2020 Sekretariat Jenderal BPK RI sebesar Rp.860 miliar yang akan digunakan untuk A, B, C, D, E. Nah A,B,C,D,E ini kita juga nanti melakukan pendalaman Pak supaya Anggota itu tahu IT itu IT apa. Kita juga nanti dari Banggar kalau memang disetujui masuk ke kita lagi, baru dari kalau dari Banggar ngga disetujui ya percuma juga kita bahas, begitu loh. Iya ya, oke ya. Komisi XI DPR RI dapat menyetujui usulan tambahan anggaran Sekretariat Jenderal BPK RI, yang akan melakukan pendalaman secara terpisah, sebesar ya ngga apa-apa, ini juga yang penting, yang penting atasnya itu. Ya saya kira ngga ada masalah ya, yang penting ada setujunya itu, kalau menyetujui berarti kita luncurkan kalau ngga setuju kita ngga akan luncurkan. Soal pendalaman itu kan nanti karena mitra ya ngga ada masalah, usulan usulan iya, iya dapat menyetujui usulan tambahan anggaran, nah ya, setuju ya, setuju Pak ya, oke terima kasih.

(RAPAT : SETUJU)

1. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran BPS dalam RAPBN tahun 2020 sebesar 7,9 triliun Rp.7.927.750.271.000,- dengan rincian:
 1. Dukungan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS Rp.2.973.171.471.000,-.
 2. Penyediaan dan pelayanan informasi statistik Rp.4.954.578.800.000,-. Setuju, setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)

2. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran BPKP dalam RAPBN tahun 2020 sebesar Rp.1.860.968.834.000,- dengan rincian:
 1. Dukungan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP sebesar Rp.1.446.061.096.000,-.
 2. Pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah sebesar Rp.414.900.738.000,-. Setuju?

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan Pak Harry.

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Saya melihat proporsi butir satu, butir dua ini dari BPKP ini kok tidak seimbang ya. Justru tugas pokoknya kenapa anggarannya jauh lebih kecil, pengawasan intern akuntabilitas, pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian. Sebetulnya apa isinya butir satu itu, dukungan management itu,

belanja pegawai terus apa lagi, timpang. Yang kedua, karena pada dasarnya tugas dan fungsi BPK dan BPKP ini kan sama, ya. Walaupun yang satu intern yang satu ekstern audit, tetapi pada dasarnya bisa disinergikan. Oleh karena itu saya punya pendapat ya kedepan ini juga dua lembaga ini sinergi, artinya jangan sampai justru saling meniadakan, karena tujuannya sebetulnya sejalan, semua bicara masalah akuntabilitas keuangan. Tadi kita bicara BPK meningkat ke audit kinerja, BPKP pun juga harusnya juga menangani audit kinerja. Intinya dua lembaga ini harusnya sinergi. Saya tidak tahu kedepan mungkin malah akan di meger ini dua ini, ya mungkin saja undang-undang bisa mengatakan begitu. Tetapi intinya proporsi anggarannya timpang. Saya khawatir tugas pokok BPKP ngga tercapai, kita tidak bisa membedah lagi anggaran itu apa saja. Tapi sulit juga kita ngga, kita tidak bisa membedah lagi rincian itu, apa saja itu tapi timpang. Itu kan dukungan self service kok lebih tinggi daripada inti kor bisnisnya, saya pikir lucu ini, ngga efisien kira-kira begitu.

KETUA RAPAT:

Dijawab dulu ini, antara satu sama nomor dua itu. Dukungan management dan pelaksanaan kan satu koma empat triliun, sementara pengawasan internal akuntabilitas keuangan negara serta pembiayaan yang yang satu koma empat triliun itu isinya apa saja, ya.

SEKRETARIS UTAMA BPKP:

Ijin Pimpinan.

Ini kaitan juga dengan pertanyaan di rapat sebelumnya Pak dari Pak Poernomosidi. Kami sudah menjelaskan disini dukungan management ini satu koma empat ini terdiri dari belanja pegawai 71 persen sekitar satu triliun tiga puluh satu miliar Pak. Kemudian belanja sarana prasarana untuk modal Pak pembangunan gedung 194 miliar, kemudian pemeliharaan operasional juga 146 miliar dan selebihnya dukungan pengawasan operasional kantor. Jadi memang sebagian besar belanja pegawai disitu Pak, karena kami lebih banyak mengelola pegawai Pak bukan proyek-proyek sehingga

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Ya itu kontraktor ourshorsing namanya. Pimpinan mohon maaf ijin. Mutasi saja ke BPK, BPK kurang pegawai audit loh. Jadi lebih fokus ke, dengan jumlah pegawai yang lebih kecil harusnya program butir dua yang 400 miliar itu bisalah, terlalu banyak pegawai itu berarti, ngga logis dari kacamata management ngga logis. BPK kurang pegawai pindahkan kesana.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya kira nanti kita lakukan pendalaman nantilah.

F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Tadi saya sempat katakan 20 Oktober menteri kita ganti, Siskudes dua point nol, aturan main pasti akan berubah. Sementara saya belum melihat dari dukungan anggaran baik dukungan management ataupun dukungan pengawasan untuk upgrade Siskudes ini kan harus ada alokasi ... begitu loh Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kita sudah diupgrade ya Pak ya. Dulu kan kalau ngga salah dua, dua nol ya, sekarang sudah dua nol dua, hah sudah diupgrade kan baru saja ini kalau ngga salah kemarin tahun 2019 waktu saya, coba saya jelaskan.

SEKRETARIS UTAMA BPKP:

Baru diupgrade awal tahun ini Pak. Jadi untuk implementasi 2019 sudah versi dua kosong. Jadi 2018 versi dua satu Pak, ini terus-terang seperti yang Bapak sampaikan tadi peraturan di Kemendagri berubah kita aplikasinya kita rubah juga, ada di pengawasan Pak sebetulnya, ijin Pak.

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Saya berpendapat ini, pemerintah ini jangan tiap tahun upgrade apa komputerisasi atau sistem ini. Ini sebetulnya yang membuat Presiden seringkali jengkel begitu loh. Sebetulnya untuk audit itu apa harus tiap tahun berubah sistem sih Siskudes versi satu versi dua. Itu kepala desa itu bisa gila itu ngikuti aturan-aturan ini, keluhannya begitu, malas sebetulnya mereka itu, ngurusin yang hanya satu miliar setahun, mulai dari Polisi, Jaksa, Kemendagri, BPKP cawe-cawe semua, habis itu untuk ngongkosin urusan beginian yang dibangun ngga ada. Jangan begitulah, kerja yang benarliah. Jangan tiap tahun berubah versi berubah versi. Jadi jangan *project oriented* kalau ngga ada proyek kelihatannya kita itu ngga kerja, bukan begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terus terang saya sudah jelaskan tadi panjang lebar, ini temuan, ya silakan.

F-NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Kita ini bukan robot, terlalu porsir kita ini. Dari konsinyering-konsinyering apalagi pendalamanlah segala macam. Jadi saya pikir rapat ini diakhiri, ngga kuat lagi. Terkait dengan alokasi dari BPKP ini adalah rasionalisasi daripada pagu indikatif menjadi pagu definitif, apalagi yang kita mau persoalkan, apalagi yang kita mau persoalkan. Ini sudah dirasionalisasi untuk semua kementerian lembaga, dari pagu indikatif dikurangi lagi menjadi pagu yang definitif, ini sudah definitif kenapa kita mau pendalaman lagi.

Cukup.

KETUA RAPAT:

Saya kira ini dapat disetujui ya, dapat disetujui ya, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

3. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran LKPP dalam RAPBN tahun 2020 sebesar Rp.169.675.434.000,- dengan rincian:
 1. Dukungan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya LKPP Rp.80.764.804.000,-.
 2. Pengembangan sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah Rp.88.910.630.000,-.

Terus kemudian ada catatan bahwa LKPP mengusulkan tambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp.116.707.032.000,-. Kalau ini kita setuju maka ini akan kita rubah kalimatnya, ya.

F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Saya setuju Pimpinan, tapi dengan catatan. Saya minta ada sebuah catatan dibawahnya terkait LKPP ini. Pengadaan mobil menteri itu menghabiskan ataupun memiliki pagu 152, sementara LKPP hanya diberikan 169, dengan 696 orang. Sebaiknya diberikan catatan, Komisi XI meminta kepada pemerintah untuk meninjau anggaran LKPP, meminta kepada pemerintah untuk meninjau anggaran LKPP, LKPP sesuai dengan program kerja yang diajukan oleh LKPP. Saya pikir mungkin bahasanya seperti apa tapi konkretnya saya meminta kepada pemerintah untuk turut memperhatikan ini, karena satu-satunya mitra kita di depan ini LKPP yang turun 20 persen lebih.

KETUA RAPAT:

Sebentar kita satu-satu dulu. Kita menyetujui ya anggaran tambahan ya.

F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Oke kalau begitu kita rubah dari catatan yang tadi bahwa Komisi XI DPR RI dapat menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2020 LKPP sebesar Rp.116.707.032.000,- ya itu jadi ngga perlu lagi kita berikan catatan. Nah kemudian mengenai catatan Pak Heri saya pikir karena ini untuk kita serahkan ke Banggar jadi tidak mungkin dibahas disitu. Jadi nanti waktu bicara dengan Menteri Keuangan tentunya ya kita sampaikan kepada Menteri Keuangan, ya. Pada hari, kita ketemu pembicaraan dengan Kementerian Keuangan hari Jumat.

F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Tapi ngga masalah bikin keterangan. Kalau disitu kan catatan meminta kepada pemerintah untuk meninjau anggaran LKPP sesuai dengan program kerja yang diajukan. Berarti ini penguatan terkait dengan masalah tambahan program kerjanya. Ya begitu Pimpinan. Saya pikir ngga ada masalah kalau Cuma itu.

Ya terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bagaimana catatan, perlu teman-teman, apa, iya. Iya silakan.

F-NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Pimpinan sebentar.

Ini kan sifatnya usulan dari Komisi XI, kita memperjuangkan mitra kita. Belum tentu disetujui oleh Banggar, saya ini ...(suara tidak jelas) Banggar punya diskresi punya otoritas, silakan siapa saja komisi berapa saja mau usul tapi belum tentu disetujui. Tapi kita mempertaruhkan positioning Komisi XI di Banggar. Jadi ini kan sifatnya itikad baik dari Komisi XI untuk membantu mitra kita dalam rangka meningkatkan kinerja segala macam.

KETUA RAPAT:

Sebentar, begini ya. Saya karena terus-terang saja saya belum pernah membuat catatan dalam apa ke Banggar, karena semuanya itu kita ini sifatnya hanya setuju atau tidak setuju saja terhadap anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Ya, jadi catatannya ini saya kira ini memang catatannya bagus ya tapi apa perlu disampaikan disini.

F-NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Ini bahasa itu Pak Pimpinan sudah bagus bahasanya. Pak Heri ngga usah diputar-putar lagi bahasanya itu sudah bagus, baku itu.

KETUA RAPAT:

Ya, perlu masih perlu?

F-NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Sudah baku itu.

KETUA RAPAT:

Masih perlu ini catatannya?

F-NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Sudah baku dalam budget sistem, Komisi XI dapat menyetujui usulan tambahan.

KETUA RAPAT:

Ngga yang bawah, yang tambahan bawah. Bukan, yang catatan.

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Pimpinan, ada masalah juga sih. Perlu nomor enam, tidak ada nomor enamnya itu karena kan satu, dua, tiga, empat, lima kan lembaga kok tiba-tiba ada nomor enam itu.

KETUA RAPAT:

Sebentar, coba kita, Begini Pak Heri. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh LKPP ini adalah program kerja yang dia sudah susun. Dari yang dia sudah susun itu dapat anggaran definitif menjadi 116 eh 169. Nah dari 169 pun dia kurang, karena kurang itu maka dia mengajukan tambahan anggaran. Karena mitra kerja kita membutuhkan betul makanya kita mensupport dengan menyetujui usulan tambahan tersebut. Sebenarnya ini sudah cukup, sudah cukup. Nah lainnya ini tentunya kita sampaikan langsung saja karena ini kita sampaikan kepada Banggar ini bukan kepada pemerintah. Banggar itu adalah sama dengan kita juga dia DPR juga gitu loh. Jadi maksud saya nanti justru malah tambah salah ngga nyambung ini, karena kalau bukan ke pemerintah tapi diserahkan kepada Badan Anggaran. Jadi kalau kita bisa perjuangkan mendapatkan 116 miliar ini saya kira LKPP juga sangat nyaman untuk bisa menyelenggarakan program kegiatannya dengan baik. Jadi saya kira ngga perlu catatan ya.

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Sebentar Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Ini usulan tambahan ini kemarin sudah dibahas dipendalaman belum?

KETUA RAPAT:

Sudah sudah.

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Sudah.

Saya ingin mempertanyakan lagi sebetulnya, yang mohon maaf Pak Hatari ya ini kesempatan saya. Program pengembangan sistem pengadaan setahu saya 2019 berjalan ini juga ada sistem pengembangan ini. Kalau tidak salah ingat pada waktu rapat 2018 itu pengembangan sistem, ini hampir di tiap kementerian ini pengembangan sistem ini selalu ada, tetapi memang kelemahan kita, kita tidak bisa kedalam satuan tiga itu, sebetulnya apa sih. Menurut pemikiran saya, akan sehat saya ini bicara mengenai *automation* ya pengembangan sistem pengadaan ini, ini kan software kan. Kalau kita membuat software itu sekali buat ya jangkauannya kan paling tidak lima tahun sepuluh tahun lah sistem itu bisa tetap *utilise* tetap *uptodate* lah dalam konteks mengakomodasi volume kerja. Pengadaan kan tidak ada perubahan yang signifikan untuk jenis pengadaannya, tapi kan kapasitasnya kan mampu. Jadi terus-terang saja bukan saya tidak setuju tapi kenapa program begini tiap tahun itu ada saja, di Kementerian Keuangan itu selalu ada. Pengembangan sistem perpajakan, pengembangan ini, apa betul sih, ini menjadi pertanyaan. Tapi kalau sudah dibahas dipendalaman ya oke go hed silakan, tapi tetap saya merasa perlu sebagai Anggota DPR Komisi XI mempertanyakan ini, apa itu. Coba kita buka 2019, ada itu pengembangan sistem itu pasti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, jadi saya sarankan nanti begitu dibahas oleh Banggar dan disetujui ini kan masuk lagi ke Komisi XI, ya kan kita lakukan penyesuaian. Sebelum kita lakukan penyesuaian kita putuskan, nah kita bisa nanya lebih luas, ya kan. Kalau sekarang ini waktunya sudah ngga ada lagi, ya saya kira setuju ya, ketok ya terima kasih.

(RAPAT : SETUJU)

Sebelum saya tutup kami persilakan yang mewakili saja dari pemerintah Menteri PPN ya, Kepala Bappenas, kami persilakan.

KEMENTERIAN BAPPENAS:

Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Ketua Sidang dan juga Anggota Dewan Komisi XI, Anggota DPR Komisi XI yang kami hormati, kami mewakili juga tidak hanya dari Kementerian PPN/Bappenas tetapi juga atas nama dari BPK, dari BPKP, dari BPS dan juga LKPP bahwa kami dapat menyetujui sepakat dengan total anggaran yang ditetapkan pada malam ini untuk anggaran 2020. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Dengan mengucapkan syukur *Alkhamdulillah* rapat saya tutup.

*Wallahumuafiq illaaqwamitoriq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 21.28 WIB)

Jakarta, 4 September 2019

**a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat**

ttd

**Drs. Urip Soedjarwono
NIP. 19620521 198203 1 001**